

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dapat tersusun. Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penysunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali dan alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam bentuk Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat menetapkan visi ***Terwujudnya industri dan perdagangan yang tangguh dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.***

Dalam mencapai visi diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) misi yaitu (1) Mengembangkan industri unggulan daerah dalam rangka mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing dalam menghadapi MEA; dan (2) Mewujudkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing serta perlindungan konsumen. Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). RKT dan PK berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Terima kasih.

Padang, Januari 2016

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sumatera Barat

Asben Hendri, SE, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631209 198611 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan tingkat kinerja yang selalu meningkat. Bentuk perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan tersebut harus tepat, jelas dan nyata secara periodik. Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 adalah melalui Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi.

Dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, telah dijabarkan Visi dinas, yakni ***"Terwujudnya industri dan perdagangan yang tangguh dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat"***. Visi dimaksud telah dituangkan pada Misi, Tujuan, dan Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2016.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, antara lain :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan ;
2. Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian daerah, melalui :
 - a. Pengembangan Kewilayahan Industri melalui Sentra dan Klaster;
 - b. Revitalisasi dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
 - c. Peningkatan daya saing produk industri melalui sertifikasi dan standarisasi produk.
3. Menjaga stabilitas perdagangan dalam negeri yang erat kaitannya dengan menciptakan stabilitas harga pokok dan pengendalian inflasi serta memberdayakan komoditi agro melalui pelaksanaan pasar lelang komoditi agro. Hal ini dicapai melalui :
 - a. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
 - b. Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha dan Aparatur Perdagangan.
4. Meningkatkan daya saing pasar rakyat melalui Peningkatan Prasarana dan Sarana Pasar.
5. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan tertib niaga dan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar ilegal dan sertifikasi mutu barang
6. Meningkatkan ekspor non migas dan pengendalian impor.

Secara umum gambaran pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat ini disampaikan dalam uraian yang mencakup analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Penetapan Kinerja Tahun 2016, analisis capaian kinerja kegiatan dan analisis kinerja keuangan. Sepanjang tahun 2016 (tahun pertama Renstra periode 2016-2021), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai program pengembangan industri dan perdagangan yang menjadi prioritas daerah sebagaimana yang diamanahkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2016-2021 dan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Program-program tersebut secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2016 ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2016. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 8 (delapan) indikator kinerja utama. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016 menunjukkan 2 (dua) sasaran telah berhasil dilaksanakan dengan sangat baik dan 1 (satu) sasaran belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik (kategori gagal). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Satu, yaitu meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan dengan capaian sangat baik (111,90 persen), diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja utama yang dapat melampaui target, yaitu
 - Indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2016 adalah sebesar 10,24 persen atau sebesar Rp. 19.709 miliar dari total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang tercatat sebesar Rp. 192.386 miliar atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 11,19 persen, sehingga persentasenya sebesar 91,51 persen;
 - Indikator Kinerja Jumlah IKM yang difasilitasi Sertifikasi Standarisasi Produk Industri. Pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 85 unit usaha yang mendapatkan sertifikat produk dan terealisasi sebanyak 130 unit usaha dengan persentase capaian kinerja sebesar 152,94 persen;
 - Indikator Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan. Pada tahun 2016 jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan ditargetkan sebanyak 652 unit usaha dan terealisasi sebanyak 672 unit usaha, sehingga persentasenya sebesar 103,07 persen;
 - Indikator Kontribusi Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Terhadap Total Ekspor Non Migas Sumatera Barat. Pada tahun 2016 nilai ekspor industri pengolahan tercatat sebesar 1.660 juta US\$, memberikan kontribusi sebesar 97,18 persen dari total ekspor non migas Sumatera Barat pada tahun 2016 yang nilainya mencapai 1.708 juta US\$. Dengan demikian persentase capaian kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas Sumatera Barat mencapai 100,06 persen dari target yang ditetapkan pada sasaran strategis satu, indikator kinerja keempat yaitu sebesar 97,12 persen pada tahun 2016
2. Sasaran Dua, yaitu meningkatnya kinerja sektor perdagangan dalam dan luar negeri dengan capaian kurang (10,19 persen), diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja utama, yakni :
 - Indikator Kinerja Persentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB. Target kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatera Barat tahun 2016 ditetapkan sebesar 14,35 persen, realisasinya dapat melampaui target yaitu sebesar 15,03 persen. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator kinerja ini adalah sebesar 104,74 persen;
 - Indikator Kinerja Peningkatan Omset Pasar Rakyat. Target peningkatan omset pasar rakyat tahun 2016 (tahun pertama Renstra 2016-2021) ditetapkan sebesar 5,5 persen, realisasinya tidak memenuhi target, yaitu hanya 4,28 persen. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 77,82 persen;

- Indikator Kinerja Peningkatan Nilai Ekspor. Target yang ditetapkan untuk peningkatan nilai ekspor non migas Sumatera Barat tahun 2016 adalah sebesar 1,5 persen, namun realisasinya mengalami penurunan sebesar 2,28 persen sehingga capaian sasaran strategis indikator ini adalah sebesar minus 152 persen.
3. Sasaran Tiga, yaitu meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga, diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja utama, yakni Indikator Kinerja Persentase Produk dan Jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI Wajib). Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib, label, MKG) pada tahun 2016 tercatat sebesar 3,57 persen atau memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,57 persen, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100 persen.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 adalah kategori Sangat Baik. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator setiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel
Rincian Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan.				111,90	Sangat Baik
		1.1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	11,19	10,24	91,51	Sangat Baik
		1.2 Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi standarisasi produk industri (unit usaha)	85	130	152,94	Sangat Baik
		1.3 Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan (unit usaha)	652	672	103,07	Sangat Baik
		1.4 Kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas Sumatera Barat (%)	97,12	97,18	100,06	Sangat Baik
2.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dalam dan luar negeri.				10,19	Gagal
		2.1 Persentase kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	14,35	15,03	104,74	Sangat Baik
		2.2 Peningkatan omset pasar rakyat (%)	5,5	4,28	77,82	Baik
		2.3 Peningkatan Nilai Ekspor (%)	1,5	(2,28)	(152,00)	Gagal
3.	Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga.				124,93	Sangat Baik
		3.1 Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib, label, MKG, distribusi, jasa, sertifikat, registrasi) (%)	3,57	3,57	100,00	Sangat Baik

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
 BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	3
1.3 Kekuatan Sumber Daya yang ada	5
1.4 Isu Strategis yang dihadapi	7
1.5 Sistematika	8
 BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	9
2.2 Perjanjian Kinerja	14
 BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Analisa Capaian Kinerja Tahun 2016	15
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2016	41
3.3 Penghargaan yang diperoleh Tahun 2016	48
 BAB IV	
PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Permasalahan dan Kendala	49
4.3 Rekomendasi	50

Lampiran : Penetapan Kinerja 2016 .

Lampiran : Perjanjian Kineja Pejabat Esselon III dan IV

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat merupakan organisasi perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 12 tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2016 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Atas dasar tersebut, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdiri sebagai bagian dari desain besar Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan seluruh proses pemerintahan dalam rangka merealisasikan keinginan bersama untuk mewujudkan Good Governance. SAKIP menuntut adanya sinergitas antara proses perencanaan, pengukuran, pelaporan sampai evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja. Pada kondisi terkini, evaluasi terhadap AKIP merupakan isu paling strategis dalam SAKIP karena pada akhir prosesnya akan dapat mencerminkan optimal atau tidaknya kinerja dari tiap-tiap



lembaga/instansi pemerintah. Sebab hal ini dapat memperlihatkan sejauh mana kemajuan instansi pemerintah dalam menerapkan manajemen kinerja yang berfokus pada hasil.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Selain sebagai bahan evaluasi, laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada pertaturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 12 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 dalam Bab XIII.A Bagian Kedua Pasal 40A disebutkan bahwa "***Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan.*** Selanjutnya pada Pasal 41A



disebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40A Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

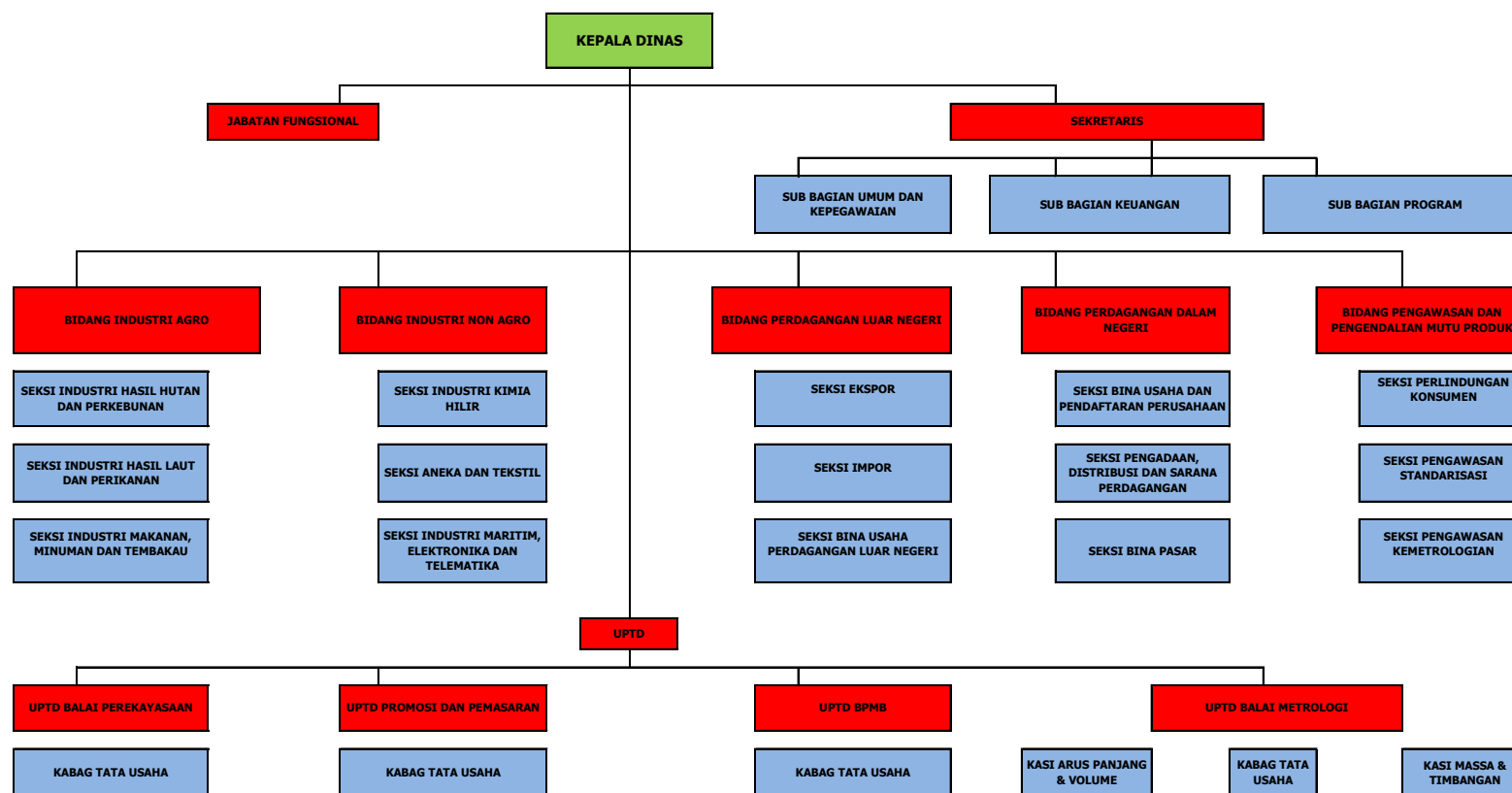
- Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 telah melaksanakan berbagai kegiatan yang ditunjang dengan dukungan dana, personil serta sarana yang tersedia agar tercapainya sasaran pembangunan ekonomi khususnya industri dan perdagangan di Sumatera Barat. Adapun program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 12 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat memiliki susunan organisasi yang terdiri atas 1 orang eselon II, 10 orang eselon III, 22 orang eselon IV dan Fungsional. Berikut jabaran struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Perda dimaksud.



Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sumatera Barat





Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2012 tanggal 28 Mei 2012, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas, mempunyai tugas :
 - Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.
 - Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah.
 - Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.
 - Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan perindustrian dan perdagangan.
 - Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, industri agro, industri non agro, perdagangan luar negeri, perdagangan dalam negeri, pengawasan dan pengendalian mutu produk, dan UPTD.
 - Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.
 - Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (LPPD).
 - Menyelenggarakan tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan industri agro, industri non agro, perdagangan luar negeri, perdagangan dalam negeri, pengawasan dan pengendalian mutu produk dan UPTD.
 - Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis perindustrian dan perdagangan.
 - Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
 - Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub. Bagian Keuangan.
 - Sub. Bagian Program
- c. Bidang Industri Agro, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Industri Hasil Laut dan Perikanan, Industri Makanan, Minuman dan Tembakau. Bidang ini terdiri dari :
 - Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.
 - Seksi Industri Hasil Laut dan Perikanan.
 - Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau.
- d. Bidang Industri Non Agro, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Industri Kimia Hilir, Industri Aneka dan Tekstil, Industri Maritim, Elektronika dan Telematika. Bidang ini terdiri dari :
 - Seksi Industri Kimia Hilir.
 - Seksi Industri Aneka dan Tekstil.
 - Seksi Industri Maritim, Elektronika dan Telematika.

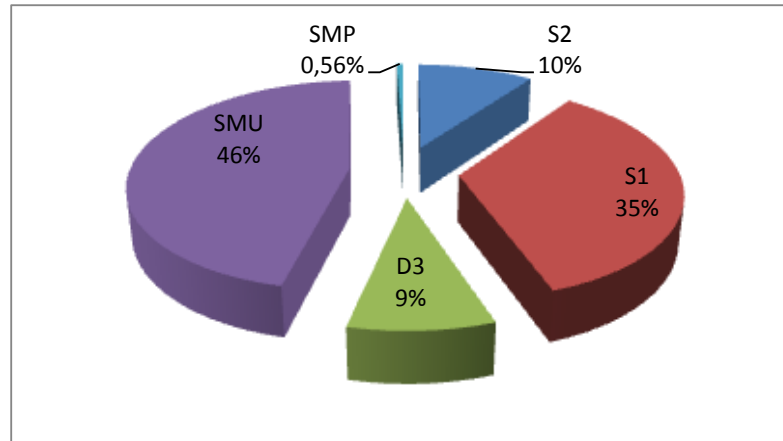


- e. Bidang Perdagangan Luar Negeri, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Ekspor, Impor, dan Bina Usaha Perdagangan Luar Negeri. Bidang ini terdiri dari :
 - Seksi Ekspor.
 - Seksi Impor.
 - Seksi Bina Usaha Perdagangan Luar Negeri.
- f. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Pengadaan Distribusi dan Sarana Perdagangan serta Bina Pasar. Bidang ini terdiri dari :
 - Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
 - Seksi Pengadaan, Distribusi dan Sarana Perdagangan.
 - Seksi Bina Pasar.
- g. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Standarisasi dan Pengawasan Kemetrolgian. Bidang ini terdiri dari :
 - Seksi Perlindungan Konsumen.
 - Seksi Pengawasan Standarisasi.
 - Seksi Pengawasan Kemetrolgian.
- h. Unit Pelaksana Teknis yang terdiri atas 4 UPTD :
 - UPTD Balai Perekayasaan
 - UPTD Balai Metrologi
 - UPTD Balai Promosi dan Pemasaran
 - UPTD BPMB
- i. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri atas :
 - Fungsional Penyuluh Perindag
 - Fungsional Perencana
 - Fungsional Penera
 - Fungsional Statistisi
 - Fungsional Penguji Mutu Barang

1.3 KEKUATAN SUMBER DAYA YANG ADA

Pada tahun 2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat memiliki pegawai sebanyak 156 orang yang terdiri atas 35 orang struktural dan 96 orang fungsional umum dan 48 orang fungsional tertentu. Pada grafik berikut dapat dilihat kekuatan pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 berdasarkan tingkat pendidikan.

Grafik 1
Kekuatan Pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Tahun 2016)



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat, pada tahun 2016 pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat 10 persen tingkat pendidikannya adalah S2 atau sebanyak 20 orang, 35 persen berpendidikan S1 atau sebanyak 53 orang, 9 persen berpendidikan D3 atau sebanyak 10 orang dan 46 persen berpendidikan SMU atau sebanyak 73 orang. Pegawai tersebut tersebar di 10 bidang yang ada di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Kekuatan Pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Menurut Bidang dan Tingkat Pendidikan (Tahun 2016)

No.	Unit	Realisasi						Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Sekretariat	3	7	1	13	-	-	24
2	Non Agro	1	5	1	3	-	-	10
3	Agro	2	6	1	10	-	-	19
4	PLN	2	2	3	4	-	-	11
5	PDN	2	4	-	6	-	-	12
6	Pengawasan	4	2	-	7	-	-	13
7	UPTD BPMB	-	8	3	6	-	-	17
8	UPTD Balai Metrologi	4	11	-	16	-	-	31
9	UPTD Balai Promosi	1	6	-	4	-	-	11
10	UPTD Perekayasaan	1	2	1	4	-	-	8
	Jumlah	20	53	10	73	-	-	156

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat

Dari sisi dukungan alokasi anggaran untuk mencapai kinerja pada tahun 2016 dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp. 35.397.003.208,- dapat teralisasi sebesar Rp. 33.095.250.928,- atau 93,50 persen untuk membiayai kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan industri dan perdagangan di Sumatera Barat. Berikut terinci pagu dana tahun 2016 dimaksud :

1. Belanja Langsung, sebesar Rp. 21.229.179.612,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 19.378.733.445,- atau 91,28 persen, yang terdiri dari :
 - a. Belanja Langsung Pokok, , sebesar Rp. 11.033.028.402,- dapat terealisasi sebesar Rp. 10.378.258.845,- atau 94,07 persen untuk 5 program dan 30 kegiatan.
 - b. Belanja Langsung Urusan, sebesar Rp. 10.196.151.210,- dapat terealisasi sebesar Rp. 9.000.474.600,- atau 88,27 persen untuk 6 program (Sektor Industri 2 program, Sektor Perdagangan 43program dan 1 program penunjang) dan 51 kegiatan.
2. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 14.167.823.596,- dapat teralisasi sebesar Rp. 13.716.517.483,- atau 96,81 persen.

1.4 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Pembangunan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan tak lepas dari isu strategis yang mempengaruhi kinerja sektor industri dan perdagangan. Isu strategis adalah permasalahan utama yang dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, telah diidentifikasi isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Daya saing produk industri kecil dan menengah dalam menghadapi perjanjian perdagangan ACFTA (ASEAN-Cina Free Trade Area). Dalam menghadapi ini produk-produk industri kecil dan menengah di Sumatera Barat masih memiliki kelemahan, antara lain :
 - Masih rendahnya daya saing produk baik kualitas maupun harganya.
 - Inovasi dan diversifikasi produk masih rendah.
 - Belum berkembangnya produk spesifik atau produk unggulan sesuai potensi daerah.
2. Masih sering terjadi gejolak harga bahan kebutuhan pokok masyarakat.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan konsumen.
4. Rendahnya kualitas produk ekspor dan kurangnya informasi mengenai prosedur ekspor.

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah :

- a. Ikhtisar Eksekutif
Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan saran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang dimabil, serta langkah antisipasinya.
- b. Bab I. Pendahuluan
Bagian ini menguraikan latar belakang, tugas, fungsi dan sturktur organisasi, isu strategis, kekuatan sumber daya serta sistematika laporan.
- c. Bab II. Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.
- d. Bab III. Akuntabilitas Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.
- e. Bab IV. Penutup
Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemcahannya untuk tahun mendatang.

Pernyataan yang diccakup dalam hal ini adalah persamaan persepsi antara setiap pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat telah mengacu pada

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menetapkan visi pembangunan yaitu : Terwujudnya Sumatera Barat yang madani dan sejahtera". Sedangkan visi tersebut dituangkan kedalam 5 (lima) misi, dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat mengacu pada misi ke 4 yaitu "Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah".

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan dimaksud, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan visi dan misi pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana dijabarkan berikut.

2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pembangunan industri dan perdagangan adalah :

"Terwujudnya industri dan perdagangan yang tangguh dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat".

Adapun makna dari visi tersebut adalah :

- | | | |
|--|---|---|
| Industri yang tangguh dan berdaya saing | : | Mengandung makna bahwa industri di Sumatera Barat bisa bertahan terhadap gejolak ekonomi yang terjadi, baik dari dalam maupun dari luar serta memiliki daya saing untuk mempertahankan diri. |
| Perdagangan yang tangguh dan berdaya saing | : | Mengandung makna bahwa perdagangan di Sumatera Barat diarahkan pada sistem dan distribusi perdagangan yang sehat dan efisien baik kedalam maupun keluar Sumatera Barat bagi pelaku perdagangan dan memberikan perlindungan bagi seluruh konsumen di Sumatera Barat dari gejolak kelangkaan stok utamanya bahan pokok dan strategis sehingga mampu menciptakan perdagangan daerah yang memiliki daya saing dan ketahanan yang tinggi yang pada akhirnya mampu berperan didalam perdagangan regional dan internasional. |
| Guna mendukung pertumbuhan ekonomi | : | Mengandung makna bahwa perkembangan sektor industri dan perdagangan dapat memberikan kontribusi |

Sumatera Barat

yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat berupa sumbangan PDRB sektor industri dan perdagangan yang tinggi yang mendukung peningkatan perekonomian daerah.

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan *sense of participation* and *sense of belonging* maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat menyatakan misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan industri unggulan daerah dalam rangka mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing dalam menghadapi MEA.
Misi ini diarahkan untuk mengembangkan industri unggulan daerah guna memperkuat daya saing produk industri yang efektif, tangguh, dan efisien baik dari sisi kualitas, desain, harga, kemasan, standarisasi serta kontinuitas produksi dengan menumbuhkan sentra-sentra industri prioritas yang menjadi potensi di daerah kabupaten/kota. Melalui peningkatan daya saing produk industri diharapkan menumbuhkan rasa kecintaan untuk menggunakan produk industri dalam negeri sendiri. Peningkatan pemakaian produk dalam negeri akan meningkatkan daya saing dan berkontribusi bagi pertumbuhan industri di Sumatera Barat. Untuk itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan industri di Sumatera Barat, dibutuhkan kekuatan struktur industri dari hulu sampai hilir serta berorientasi pasar global, sehingga bisa mengambil peranan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
2. Mewujudkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing serta perlindungan konsumen.
Misi ini diarahkan untuk mengembangkan perdagangan khususnya untuk meningkatkan ekspor non migas Sumatera Barat dan penguatan pasar dalam negeri melalui Pemberdayaan terhadap pelaku UMKM (teknis dan permodalan) sehingga produk bisa lebih berkualitas, memproduksi secara kontinyu, memenuhi standar yang ditentukan, merek terdaftar, label halal, kemasan yang lebih baik; Pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal barang (SKA) dari negara mitra FTA, guna melindungi produk dalam negeri; Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan gerakan Aku Cinta Indonesia (ACI), dan pengembangan ekonomi kreatif (Inpres No. 6/2009: Program Ekonomi Kreatif); dan Meningkatkan tindakan pengamanan produk dalam negeri dengan pengawasan terhadap barang beredar

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan seperti yang dikemukakan diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2011-2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan peranan sektor industri dalam perekonomian daerah.
2. Meningkatkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing.

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2016-2021) dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :

1. Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan;
2. Meningkatnya kinerja perdagangan dalam dan luar negeri negeri;
3. Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga.

Hubungan hirarkis antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Perindustrian dan Perdagangan kurun waktu 5 (lima) tahun (2016-2021) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sumatera Barat

VISI :	
Terwujudnya industri yang tangguh dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.	
	
MISI :	
1.	Mengembangkan industri unggulan daerah dalam rangka mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing dalam menghadapi MEA;
2.	Mewujudkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing serta perlindungan konsumen.
	
TUJUAN :	
1.	Meningkatkan peranan sektor industri dalam perekonomian daerah;
2.	Meningkatkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing.
	
SASARAN :	
1.	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan;
2.	Meningkatnya kinerja perdagangan dalam dan luar negeri;
3.	Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga.

Sumber : Renstra Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan indikator kinerja utama masing-masing sasaran strategis tersebut seperti digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2016

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatkan peranan sektor industri dalam perekonomian daerah.	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan.	1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%); 2. Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk industri (unit usaha); 3. Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan (unit usaha); 4. Persentase kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas Sumatera Barat
Meningkatkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing.	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan.	1. Persentase kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%); 2. Persentase omset pasar rakyat; 3. Peningkatan nilai ekspor (%);
	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan.	1. Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI Wajib, label, MKG) (%).

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat Tahun 2016

Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi serta misi, dan untuk pemantapan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang industri dan perdagangan.

Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya yang akan menjadi dasar untuk perumusan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi dan kebijakan tersebut berperan penting untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, dan telah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Strategi untuk sektor perindustrian yang dirumuskan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mengembangkan industri unggulan daerah dalam rangka mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing dalam menghadapi MEA.

Tujuan 1 : Meningkatkan peranan sector industry dalam perekonomian daerah.

Sasaran 1 : Meningkatkan kinerja sektor industri pengolahan

Strategi :

1. Mengembangkan usaha hilirisasi produk industri pengolahan;
2. Meningkatkan daya saing produk industri;
3. Menjamin ketersediaan bahan baku bagi pengembangan usaha industri kecil



Kebijakan :

1. Pengembangan dan peningkatan usaha industri berbasis klaster;
2. Pengembangan sentra industri potensial;
3. Peningkatan daya saing melalui fasilitasi pengembangan industri kecil menengah agro dan non agro;

Strategi untuk sektor perdagangan yang dirumuskan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Misi 2 : Mewujudkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing serta perlindungan terhadap konsumen.

Tujuan 2 : Meningkatkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing.

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dalam dan luar negeri.

Strategi :

1. Memperkuat pasar dalam negeri;
2. Mengembangkan pasar ekspor komoditi daerah.

Kebijakan :

1. Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan memperkuat jaringan distribusi;
2. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
3. Peningkatan standarisasi dan mutu produk ekspor;
4. Peningkatan diversifikasi dan nilai tambah produk ekspor;
5. Penguatan kelembagaan dan kerjasama perdagangan regional dan internasional;
6. Pengembangan negara tujuan ekspor dan jejaring kerjasama perdagangan luar negeri;
7. Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional dan perluasan pasar ekspor non konvensional.

Sasaran 2 : Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga.

Strategi :

1. Peningkatan pengawasan barang dan jasa;
2. Peningkatan pengawasan tertib niaga

Kebijakan :

1. Peningkatan efektivitas pengawasan perlindungan konsumen;

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2016, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) yang mengalami revisi disebabkan menyesuaikan dengan target kinerja dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan sekaligus sebagai komitmen pimpinan untuk berkinerja dengan baik. Perjanjian Kinerja tersebut mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra 2016-2021 sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan.	1.1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	11,19
		1.2 Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi standarisasi produk industri (unit usaha)	85
		1.3 Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan (unit usaha)	652
		1.4 Kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas Sumatera Barat (%)	97,12
2.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dalam dan luar negeri.	2.1 Persentase kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	14,35
		2.2 Peningkatan omset pasar rakyat (%)	5,5
		2.3 Peningkatan Nilai Ekspor (%)	1,5
3.	Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga.	3.1 Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib, label, MKG) (%)	3,57

NO.	Program	Anggaran	Sumber
1.	Program Pengembangan Perwilayahan	Rp. 886.502.000	APBD
2.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp. 3.174.462.500	APBD
3.	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri.	Rp. 3.593.934.650	APBD
4.	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Rp. 998.292.000	APBD
5.	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.	Rp. 1.169.249.860	APBD
6.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Rp. 373.710.200	APBD
	JUMLAH	Rp. 10.196.151.210	

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat Tahun 2016

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini dilaporkan akuntabilitas kinerja meliputi hasil pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, hasil analisis pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, serta akuntabilitas keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2016. Kinerja tersebut diukur dengan membandingkan antara target Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan realisasi capaian.

3.1 ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana dalam hal ini, tingkat capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut.

Tabel 5
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2016

No	Klasifikasi	Predikat
1	85% - 100%	Sangat baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	Kurang dari 53 %	Gagal

Pengukuran kinerja tahun 2016 merupakan pengukuran tahun pertama Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021. Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2016 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) target indikator kinerja.

Tingkat capaian kinerja Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 6
Hasil Capaian Kinerja Tahun 2016**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan.				111,90	Sangat Baik
		1.1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	11,19	10,24	91,51	Sangat Baik
		1.2 Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi standarisasi produk industri (unit usaha)	85	130	152,94	Sangat Baik
		1.3 Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan (unit usaha)	652	672	103,07	Sangat Baik
		1.4 Kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas Sumatera Barat (%)	97,12	97,18	100,06	Sangat Baik
2.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dalam dan luar negeri.				10,19	Gagal
		2.1 Persentase kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	14,35	15,03	104,74	Sangat Baik
		2.2 Peningkatan omset pasar rakyat (%)	5,5	4,28	77,82	Baik
		2.3 Peningkatan Nilai Ekspor (%)	1,5	(2,28)	(152,00)	Gagal
3.	Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga.				124,93	Sangat Baik
		3.1 Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib, label, MKG, distribusi, jasa, sertifikat, registrasi) (%)	3,57	3,57	100,00	Sangat Baik

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa dari 8 (delapan) indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, terdapat 6 (enam) indikator dengan predikat sangat baik, 1 (satu) indikator dengan predikat baik, dan 1 (satu) indikator dengan predikat gagal. Indikator yang gagal adalah peningkatan nilai ekspor yaitu negatif 2,28 persen dari target peningkatan nilai ekspor yang diharapkan sebesar 1,5 persen.

Guna melihat realisasi dan capaian kinerja terkait dengan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi pelaksanaan Renstra tahun pertama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Periode Renstra 2016-2021, dapat dilihat pada uraian berikut.

3.1.1 Sasaran Strategis Satu Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan

Dalam rangka mewujudkan misi pertama yaitu mengembangkan industri unggulan daerah dalam rangka mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing dalam menghadapi MEA, serta guna mencapai tujuan pertama meningkatkan peranan sektor industri dalam perekonomian daerah, maka ditetapkan sasaran strategis satu yaitu meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan dengan 4 (empat) indikator utama dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 7
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Satu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan.				111,90	Sangat Baik
		1.1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	11,19	10,24	91,51	Sangat Baik
		1.2 Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi standarisasi produk industri (unit usaha)	85	130	152,94	Sangat Baik
		1.3 Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan (unit usaha)	652	672	103,07	Sangat Baik
		1.4 Kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas Sumatera Barat (%)	97,12	97,18	100,06	Sangat Baik

Sumber : BPS Sumatera Barat, data diolah

3.1.1.1 Indikator Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2016 berdasarkan data sementara adalah sebesar 10,24 persen atau sebesar Rp. 19.709 miliar dari total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang tercatat sebesar Rp. 192.386 miliar atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 11,19 persen, sehingga persentase capaiannya sebesar 91,51 persen. Hasil indikator kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB dihitung sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi sub sektor industri terhadap PDRB (\%)} = \frac{\text{Rp. 19.709 miliar}}{\text{Rp. 192.386 miliar}} \times 100 = 10,24 \%$$

Catatan :

1. Nilai PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Tahun 2016 sebesar Rp. 19.709 miliar
2. Nilai PDRB Sumatera Barat sebesar Rp. 192.386 miliar

Kinerja ini jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu mencapai 10,25 persen, sedikit mengalami penurunan. Lebih lengkap realisasi kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 dan tahun 2016 tergambar pada tabel berikut.

Tabel 8
Realisasi Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Industri
Terhadap PDRB Sumatera Barat Tahun 2015-2016 (%)

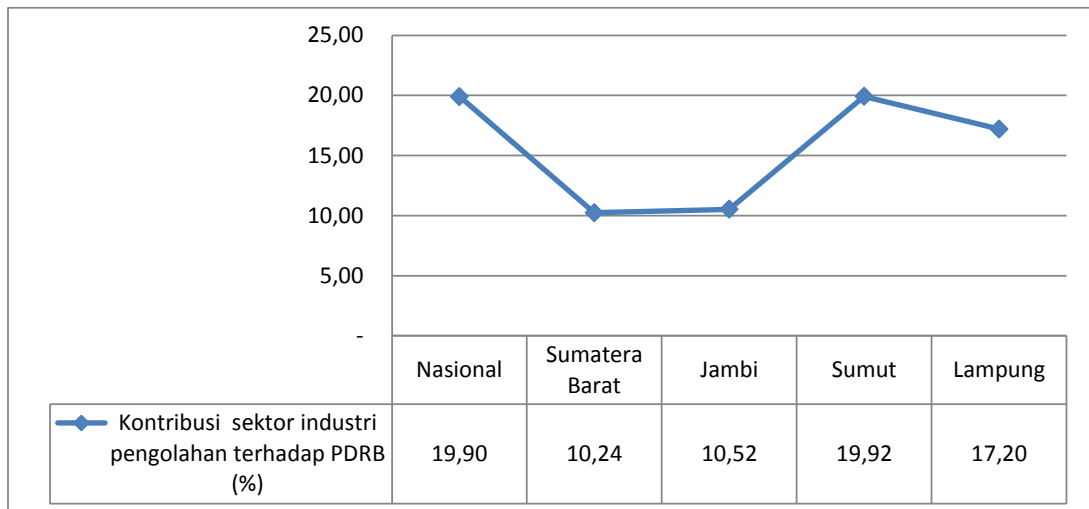
No.	Industri Pengolahan	Nilai Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (juta rupiah)		Kontribusi Tahun 2015	Kontribusi Tahun 2016
		2015	2016		
1.	Industri batubara dan pengilangan migas	670,7	856,8	0,00	0,00
2.	Industri makanan dan minuman	8.393.933,9	8.712.560,2	4,69	4,53
3.	Pengolahan tembakau	-	-	-	-
4.	Industri tekstil dan pakaian jadi	3.612.970,0	4.615.140,1	2,02	2,40
5.	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	8.836,5	9.028,8	0,00	0,00
6.	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.	8.385,7	9.041,6	0,00	0,00
7.	Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman.	7.350,4	7.417,5	0,00	0,00
8.	Industri kimia, farmasi dan obat tradisional.	36.204,4	36.461,2	0,02	0,02
9.	Industri karet, barang dari karet dan plastik.	2.598.655,2	2.659.405,8	1,45	1,38
10.	Industri barang galian bukan logam.	3.461.484,7	3.462.400,4	1,94	1,80
11.	Industri logam dasar.	-	-	-	-
12.	Industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik.	127.719,5	128.552,6	0,07	0,07
13.	Industri mesin dan perlengkapan YTDL.	-	-	-	-
14.	Industri alat angkutan.	5.515,3	5.614,0	0,00	0,00
15.	Industri furniture	21.523,9	21.623,5	0,01	0,01
16.	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.	38.215,2	41.012,8	0,02	0,02
Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB (ADHB)		18.321.465,54	19.709.115,25	10,25	10,24
PDRB Sumatera Barat (ADHB)		178.810.456,68	192.386.143,36	100,00	100,00

Sumber : BPS Sumatera Barat, data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai produksi sektor industri pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Nilai produksi sektor industri pengolahan pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 18.321.465,54 juta, meningkat sebesar 7,57 persen atau Rp. 19.709.115,25 juta pada tahun 2016. Tetapi kontribusinya mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Sumatera Barat tercatat sebesar 10,25 persen, menurun sebesar 0,01 persen atau 10,24 persen pada tahun 2016.

Jika dibandingkan dengan beberapa provinsi tetangga (Provinsi Jambi, Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Utara) dan nasional, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB di Sumatera Barat cenderung lebih rendah. Data selengkapnya tergambar pada grafik berikut.

Grafik 2
Realisasi Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB dibandingkan dengan Provinsi Lain dan Nasional Tahun 2016



Sumber : BPS, data diolah

Terjadinya penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2016 ini disebabkan beberapa hal yaitu :

1. Naiknya harga pembelian bahan baku, khususnya pada kelapa sawit dan karet seiring mulai pulihnya harga komoditas internasional;
2. Kenaikan TTL yang terjadi secara gradual selama triwulan III 2016 menambah tekanan biaya operasional perusahaan dan industri kecil menengah;
3. karena adanya peningkatan kontribusi sektor lain terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat yaitu Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,06 persen) yang juga merupakan kinerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

Pengelolaan sektor industri pada dasarnya merupakan masalah yang dihadapi semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Walaupun intensitas dari masalah tersebut mungkin sekali berbeda karena adanya perbedaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti laju pertumbuhan ekonomi, teknologi yang dipergunakan dan kebijaksanaan pemerintah. dilihat dari sudut pandang makro ekonomi, perluasan sektor industri dapat terjadi melalui pertumbuhan ekonomi yaitu melalui proses kenaikan output produksi secara konstan dalam jangka panjang. Untuk itu kontribusi sektor industri sangatlah penting dalam meningkatkan PDRB, dengan peningkatan output dari sektor industri maka tentu saja berdampak positif terhadap PDRB.

Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terus berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap peningkatan peranan sektor industri dalam perekonomian daerah. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain memperkuat basis produksi melalui pendekatan sentra dan klaster melalui Program Pengembangan Perwilayahan Industri dengan kegiatan utama membina dan mengembangkan cabang industri yang memberikan sumbangan terbesar dalam PDRB

Sumatera Barat, seperti Kegiatan Pengembangan Tenun Sumatera Barat, Pengembangan Produk Bordir/Sulaman Sumatera Barat, Pengembangan Produk dari Kulit dan Pengembangan Minyak Atsiri. Potret realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

3.1.1.2 Indikator Jumlah IKM yang difasilitasi Sertifikasi Standarisasi Produk Industri (unit usaha).

Dengan telah disepakatinya perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diberlakukan sejak tahun 2015, Industri Kecil dan Menengah (IKM) Sumatera Barat harus siap bersaing menghadapi produk-produk asing yang masuk ke Indonesia khususnya ke Sumatera Barat. Salah satu upaya yang harus dilakukan IKM Sumatera Barat adalah meningkatkan kualitas produk dengan memberikan jaminan keamanan produk kepada konsumen melalui sertifikasi standarisasi produk.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam Renstra Tahun 2016-2021 menjadikan salah satu indikator kinerjanya yaitu jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi standarisasi produk industri. ***Pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 85 unit usaha yang mendapatkan sertifikat produk dan terealisasi sebanyak 130 unit usaha dengan persentase capaian kinerja sebesar 152,94 persen.*** Fasilitas standarisasi yang diberikan kepada IKM meliputi :

1. Fasilitas Sertifikasi Halal
Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk pencantuman label halal. ***Pada tahun 2016 jumlah sertifikat halal yang diberikan sebanyak 45 sertifikat halal.***
2. Fasilitas HKI
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari bidang hukum yang secara luas mengacu pada ciptaan hasil olah pikir manusia dan melindungi kepentingan pencipta dengan memberi hak kepemilikan atas ciptaannya. Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua cabang yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta. ***Adapun IKM yang difasilitasi untuk memperoleh HKI pada tahun 2016 berjumlah 50 IKM dengan fasilitas HKI berupa merk.***
3. Fasilitas MD
MD merupakan izin produk makanan yang diproduksi dalam negeri yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Label MD pada kemasan produk dikeluarkan berdasarkan lokasi pabrik, jenis produk, kandungan bahan produk dan kemasan. ***Pada tahun 2016 telah difasilitasi sebanyak 35 IKM untuk mendapatkan label MD.***
4. Fasilitas SNI
SNI adalah Standar Nasional Indonesia yang merupakan standar yang dipakai sebagai acuan sesuai kebutuhan antara lain untuk menjamin produk bahwa kualitas produk terjamin mutunya sesuai SNI. Disamping itu SNI merupakan bentuk pengakuan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen dan industri dalam negeri dalam

menghadapi era global. Fasilitas SNI untuk IKM baru ditargetkan diberikan pada tahun 2017.

Pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ditargetkan untuk memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi bagi 548 IKM. Pada tahun 2016 yang merupakan tahun pertama Renstra telah difasilitasi sebanyak 130 IKM, berarti telah tercapai sebesar 22,62 persen dari target Renstra Periode 2016-2021. Lebih lengkap gambaran fasilitas sertifikasi dan standarisasi yang telah diberikan kepada IKM selama tahun 2015 dan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9
IKM yang difasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja	Realisasi	
	2015	2016
Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi standarisasi produk industri (unit usaha) :	102	130
a. Sertifikat halal	50	45
b. HKI	50	50
c. MD	-	35
d. ISO / SNI	2	-

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sumbar

Sampai saat ini masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi pelaku usaha maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan industri untuk mendapatkan sertifikasi dan standarisasi serta menerapkannya, permasalahan tersebut antara lain :

- Penerbitan sertifikat merk, halal, MD dan SNI membutuhkan waktu yang lama;
- Merk yang didaftarkan sama/memiliki kemiripan;
- Tingginya biaya pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat;
- Masih rendahnya kesadaran yang dimiliki IKM untuk mendapatkan sertifikasi dan standarisasi sebagai salah satu faktor dalam peningkatan daya saing produk industri.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat untuk memenuhi target indikator sertifikasi dan standarisasi produk bagi IKM pada tahun 2016 adalah :

- Melalui Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kegiatan Sosialisasi Kemasan, Sertifikasi Halal, MD dan SNI bagi IKM serta Penyebarluasan Informasi HKI dan Bantuan Pendaftaran Merk. Melalui program dan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan standarisasi industri guna menghasilkan produk-produk yang berkualitas sesuai permintaan pasar serta perlindungan terhadap konsumen;
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dapat memberikan fasilitas sertifikasi dan standarisasi kepada IKM.

3.1.1.3 Indikator Jumlah IKM yang Mendapatkan Pelatihan dan Pembinaan (unit usaha).

Untuk mendukung pertumbuhan industri yang optimal di Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat menjadikan peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu indikator kinerjanya dengan nama indikator Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan. *Pada tahun 2016 jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan ditargetkan sebanyak 652 unit usaha dan terealisasi sebanyak 672 unit usaha, sehingga persentase capaiannya sebesar 103,07 persen.*

Kinerja ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 2015 IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan berjumlah 302 unit usaha, lebih lengkap tergambar pada tabel berikut :

Tabel 10
Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan
Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja	2015	2016		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.3 Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan (unit usaha)	302	652	672	103,07

Pelatihan dan pembinaan terhadap IKM diprioritaskan pada segi pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM IKM, agar dapat mengembangkan diri untuk berwirausaha dengan baik. Pada tahun 2016 telah dilakukan pembinaan dan pelatihan dalam Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kegiatan utama antara lain :

1. Pembinaan Kelompok Industri Berbasis Coklat bagi 25 orang IKM;
2. Pembinaan Pengelolaan Limbah Cair Industri Kecil Menengah bagi 12 orang IKM dari 12 kabupaten/kota;
3. Pelatihan Ketrampilan Industri Perkapalan Rakyat bagi 20 orang IKM dari 6 kabupaten/kota;
4. Pelatihan Pembuatan Alsintan bagi 30 orang IKM perbengkelan;
5. Pelatihan Penggunaan Teknologi Tepat Guna bagi 20 orang IKM dari 18 kabupaten/kota;
6. Pelatihan Wirausaha Baru di Bidang Industri bagi 50 orang pelaku usaha industri kecil;
7. Pelatihan Produksi Barang dari Bahan Baku Karet (Compound) bagi 20 orang IKM.

3.1.1.4 Indikator Kontribusi Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Terhadap Total Ekspor Non Migas Sumatera Barat (%)

Industri pengolahan mempunyai peranan besar dalam meningkatkan kinerja ekspor non migas di Sumatera Barat. Pada tahun 2016 nilai ekspor industri pengolahan tercatat sebesar 1.660 juta US\$, memberikan kontribusi sebesar 97,18 persen dari total ekspor non migas Sumatera Barat pada tahun 2016 yang nilainya mencapai 1.708 juta US\$. Dengan demikian persentase capaian kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap

total ekspor non migas Sumatera Barat mencapai 100,06 persen dari target yang ditetapkan pada sasaran strategis satu, indikator kinerja keempat yaitu sebesar 97,12 persen pada tahun 2016. Realisasi indikator kinerja ini dihitung sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi nilai ekspor sektor industri terhadap total ekspor non migas (\%)} = \frac{1.660,0 \text{ juta US \$}}{1.708,1 \text{ juta US \$}} \times 100 = 97,18 \%$$

Catatan :

1. Nilai ekspor industri pengolahan tahun 2016 sebesar 1.660,0 juta US \$
2. Nilai ekspor non migas Sumatera Barat tahun 2016 sebesar 1.708,1 juta US \$

Pada tahun 2016 ini yang merupakan tahun pertama Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021, indikator kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas Sumatera Barat mencapai 97,19 atau sebesar 1.660 juta US\$ dari total ekspor non migas Sumatera Barat sebesar 1.708,1 juta US\$. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2015 kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 0,09 persen, dimana pada tahun 2015 nilai ekspor produk industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 97,06 persen atau sebesar 1.697,2 juta US\$ terhadap total ekspor non migas Sumatera Barat sebesar 1.748 juta US\$. Gambaran lengkap per komoditi sektor industri pengolahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11
Ekspor Komoditi Industri Pengolahan Tahun 2015-2016

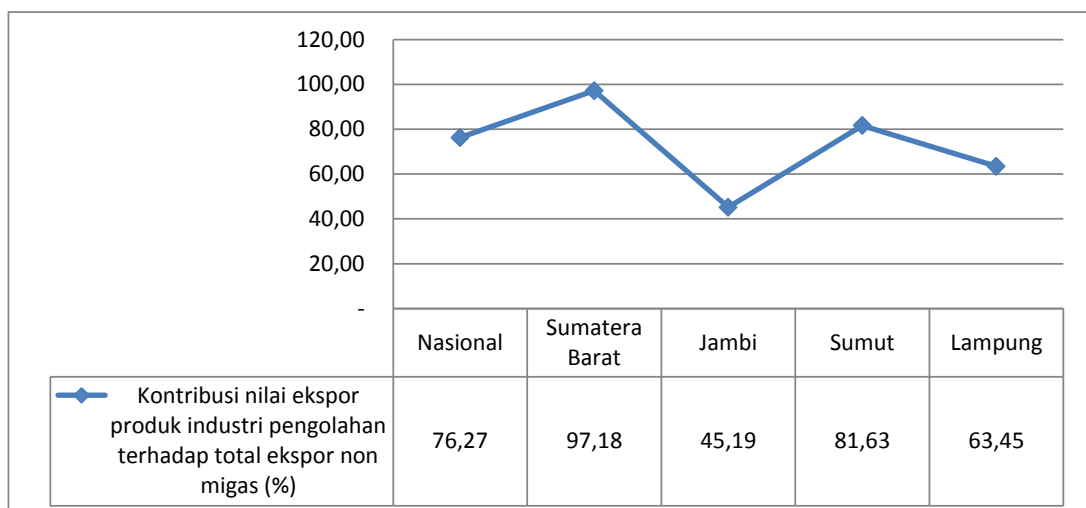
No	Komoditi Industri Pengolahan	Nilai FOB (Juta US\$)		% Peran terhadap Total Ekspor Non Migas Tahun 2015	% Peran terhadap Total Ekspor Non Migas Tahun 2016
		2015	2016		
1	Minyak Kelapa Sawit	994,6	1.004,8	56,90	58,83
2	Crumb Rubber	420,3	406,6	24,04	23,80
3	Minyak Biji Kelapa Sawit	83,6	84,3	4,78	4,94
4	Crepe	40,7	21,8	2,33	1,28
5	Asam Berlemak Lainnya	19,2	34,9	1,10	2,04
6	Minyak Atsiri Lainnya	11,3	12,2	0,65	0,71
7	Makanan Olahan	16,0	29,6	0,92	1,73
8	Buah/Sayuran Olahan	5,6	7,1	0,32	0,42
9	Minuman Olahan	3,5	3,0	0,20	0,18
10	Sheet	-	-	-	-
11	Ikan Olahan	0,3	0,1	0,02	0,01
12	Kayu Olahan Lain	1,3	1,4	0,07	0,08
13	Hasil Industri Lain	100,8	54,2	5,77	3,17
Total Industri Pengolahan		1.697,2	1.660,0	97,09	97,18
Total Ekspor Non Migas		1.748,0	1.708,1	100,00	100,00

Sumber : BPS Sumatera Barat, data diolah.

Peningkatan kontribusi ekspor komoditi industri pengolahan terhadap total ekspor non migas pada tahun 2016 lebih disebabkan karena terjadinya penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap total ekspor non migas Sumatera Barat.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain dan nasional, kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas pada tahun 2016 di Sumatera Barat masih lebih besar. Pada tahun 2016 berdasarkan data BPS tercatat nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas di Provinsi Jambi sebesar 45,19 persen atau 758 juta US \$ dari total nilai ekspor Provinsi Lampung sebesar 1.678 juta US \$, Provinsi Sumatera Utara sebesar 81,63 persen atau 5.736 juta US \$ dari total nilai ekspor Provinsi Sumatera Utara sebesar 7.026 juta US \$, Provinsi Lampung sebesar 63,45 persen atau 2.025 juta US\$ dari total nilai ekspor Provinsi Lampung sebesar 3.191,73 juta US\$ dan Nasional sebesar 76,27 persen atau 99.655 juta US\$ dari total nilai ekspor non migas nasional sebesar 118.797,5 juta US\$. Tingkat perbandingan kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3
Realisasi Kontribusi Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Sumatera Barat Terhadap Total Ekspor Non Migas Sumatera Barat dibandingkan dengan Provinsi Lain dan Nasional Tahun 2016



Sumber : BPS, data diolah

Untuk mendukung capaian sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan dengan 4 (empat) indikator yaitu Kontribusi sektor industri terhadap PDRB, Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk industri, Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan serta Kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas Sumatera Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 program urusan Perindustrian. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016 tergambar pada tabel berikut.



Tabel 12
Realisasi Program dan Kegiatan 2016
Pada Sasaran Strategis Satu

Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian
SS 1 Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan	- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	Program Pengembangan Wilayah Industri	886.502.000	650.703.832	73,40
		Pengembangan Tenun Sumatera Barat	240.366.000	225.458.200	93,80
		Pengembangan Produk Bordir/Sulaman Sumatera Barat	479.582.000	280.126.100	58,41
		Pengembangan Desain Produk dari Kulit.	94.075.000	91.527.200	97,29
		Koordinasi Pengembangan Minyak Atsiri	72.479.000	53.592.332	73,94
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	3.174.462.500	2.864.130.891	90,22
	- Persentase kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas Sumatera Barat (%)	Pembinaan Industri Kecil Menengah Berbasis Hasil Laut dan Perikanan	215.278.000	207.044.700	96,18
		Pembinaan dan Pengembangan Produk Kerajinan Sumbar	535.080.000	501.280.461	93,68
		Pengembangan Industri Minuman	86.075.000	79.697.000	92,59
		Pelatihan Teknis dan Pengembangan Disain Kerajinan Kayu dan Bambu.	95.549.000	94.447.000	98,85
		Pengembangan Industri Kerajinan Batu Permata (Batu Aki)	58.000.000	56.243.000	96,97
		Pelatihan Teknis dan Diversifikasi Produk Minyak Atsiri.	68.095.000	63.373.623	93,07
	- Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi standarisasi produk industri (unit usaha)	Penyebarnya Informasi HKI dan Bantuan Pendaftaran Merk	120.000.000	114.996.000	95,83
		Sosialisasi Kemasan, Sertifikasi Halal, MD dan SNI bagi IKM	99.951.000	96.484.100	96,53
		Pelatihan Teknik Pengelasan Alsintan	240.000.000	226.243.600	94,27
		Pembinaan Kelompok Industri Berbasis Coklat	72.500.000	69.874.000	96,38
		Pembinaan Pengelolaan Limbah Cair Industri Kecil Menengah.	66.062.000	59.583.000	90,19
		Pelatihan Ketrampilan Industri Perkapalan Rakyat.	146.311.000	86.862.800	59,37
	- Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan (unit usaha)	Pelatihan Pembuatan Alsintan	366.761.500	362.594.500	98,86
		Pembuatan Prototipe Teknologi Tepat Guna	394.106.000	295.643.100	75,02
		Pelatihan Penggunaan Teknologi Tepat Guna bagi Industri Kecil Menengah.	125.000.000	122.480.600	97,98
		Pelatihan Wirausaha Baru di Bidang Industri	117.580.000	114.394.000	97,29
		Sosialisasi Penerbitan dan Pemanfaatan Izin Usaha Industri bagi Industri Kecil Menengah dan Aparatur	60.000.000	48.516.000	80,86
		Pelatihan Produksi Barang dari Bahan Baku Karet (Compound)	158.114.000	141.318.300	89,38
		Penyusunan Naskah Akademik Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah	150.000.000	123.055.107	82,04

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terdapat 2 (dua) program yang digunakan pada tahun 2016 untuk mencapai sasaran kinerja urusan Perindustrian, yaitu:

1. Program Pengembangan Kewilayahan Industri

a. Tujuan Program, Pagu Anggaran dan Realisasi

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kewilayahan industri dalam bentuk sentra dan klaster sehingga bisa memberikan nilai tambah yang lebih terhadap perekonomian Sumatera Barat. Pagu anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 886.502.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 650.703.832,- atau 73,40 persen. Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Pengembangan Tenun Sumatera Barat, Kegiatan Pengembangan Produk Bordir/Sulaman Sumatera Barat, Kegiatan Pengembangan Desain Produk dari Kulit dan Kegiatan Koordinasi Pengembangan Minyak Atsiri.

b. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan:

- Program Pengembangan Kewilayahan Industri yang dilakukan oleh Provinsi tidak selaras dengan program pengembangan di kabupaten/kota karena program pengembangan Kewilayahan Industri mengacu kepada Pusat dan Provinsi sementara kabupaten/kota memiliki agenda tersendiri sesuai dengan RPJMD kabupaten/kota;
- Belum adanya dukungan dari kabupaten/kota dalam hal melegal formalkan pengembangan kewilayahan industri melalui sentra dan klaster, sehingga provinsi mengalami kesulitan dalam mengembangkannya.
- Belum termanfaatkannya dengan baik Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) dalam mengimplementasikan hasil diagnosisnya terhadap sentra, sehingga progres pengembangan sentra belum optimal.
- Belum optimalnya target peningkatan nilai produksi IKM ayang ada dalam sentra binaan, sehingga belum bisa memberikan kontribusi yang banyak terhadap PDRB Sumatera Barat.

Upaya Pemecahan Masalah:

- Melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota sebelum ataupun pada tahun pembangunan sedang berjalan, agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan kewilayahan industri dapat disepakati bersama.
- Memanfaatkan TPL binaan Kementerian Perindustrian dalam melakukan diagnosis pengembangan sentra serta menjadikannya sebagai database pengembangan dan pembinaan sentra selanjutnya, terutama dalam rangka peningkatan nilai produksi IKM dalam sentra binaan.

2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

a. Tujuan Program, Pagu Anggaran dan Realisasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk bagi IKM serta meningkatkan kualitas SDM IKM dalam mengembangkan komoditi unggulan di Sumatera Barat. Pagu anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 3.174.462.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.864.130.891,- atau 90,22 persen. Program ini didukung oleh 19 (sembilan belas) kegiatan yaitu

Kegiatan Pelatihan Teknis dan Diversifikasi Produk Minyak Atsiri, Kegiatan Pembinaan Kelompok Industri Berbasis Coklat, Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Limbah Cair kepada Pelaku IKM, Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Industri Perkapalan Rakyat, Kegiatan Pembuatan Alsintan, Kegiatan Pembuatan Prototipe Teknologi Tepat Guna Alsintan, Kegiatan Pelatihan Produksi Barang dari Bahan Baku Karet, Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Menengah Berbasis Hasil Laut dan Perikanan, Kegiatan Pengembangan Industri Minuman, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Produk Kerajinan Sumbar, Kegiatan Sosialisasi Kemasan, Sertifikasi Halal, MD dan SNI bagi IKM serta Kegiatan Penyebarluasan Informasi HKI dan Bantuan Pendaftaran Merk.

b. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan:

- Kegiatan yang ada pada program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah masih belum optimal dalam usaha pencapaian sasaran program.
- Masih rendahnya kesadaran yang dimiliki IKM untuk mendapatkan SNI dan Sertifikasi lainnya sebagai salah satu faktor dalam peningkatan daya saing produk industri;
- Terbatasnya jumlah pegawai yang menguasai bidang-bidang teknis sehingga pendampingan kurang optimal;
- Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan IKM pangan dalam melakukan diversifikasi dan inovasi pengolahan komoditi pertanian, perkebunan maupun kehutanan baik dalam rasa, jenis, bentuk maupun kemasan;

Upaya Pemecahan Masalah:

- Agar sasaran program dapat dicapai, kedepannya perlu untuk menempatkan kegiatan-kegiatan yang tepat sehingga hasil capaian program lebih optimal.
- Sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan sertifikasi serta standarisasi produk akan terus dilakukan bagi IKM dengan melibatkan pihak lain yang terkait.
- Pelatihan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan akan terus dilakukan, terutama untuk meningkatkan nilai jual produk IKM dalam ranah ekspor.

3.1.2 Sasaran Strategis Dua Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

Untuk dapat mencapai misi kedua, yaitu mewujudkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing serta perlindungan konsumen dan guna mencapai tujuan kedua pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing maka ditetapkan sasaran strategis yang kedua, yaitu meningkatnya kinerja sektor perdagangan dalam dan luar negeri.

Dalam sasaran strategis yang kedua ini, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang dapat diukur. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis kedua, serta analisa dari ketiga indikator kinerjanya, akan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 13
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dua

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dalam dan luar negeri.				10,19	Kurang
		2.1 Persentase kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	14,35	15,03	104,74	Sangat Baik
		2.2 Peningkatan omset pasar rakyat (%)	5,5	4,28	77,82	Baik
		2.3 Peningkatan Nilai Ekspor (%)	1,5	(2,28)	(152,00)	Kurang

Sumber : BPS Sumatera Barat, dan Dinas Perindag Sumatera Barat, data diolah

3.1.2.1 Indikator Kinerja Persentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)

Target kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatera Barat tahun 2016 ditetapkan sebesar 14,35 persen, realisasinya dapat melampaui target yaitu sebesar 15,03 persen. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator kinerja ini adalah sebesar 104,74 persen. Hasil indikator kinerja persentase kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB dihitung sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB (\%)} = \frac{\text{Rp. 28.914 miliar}}{\text{Rp. 192.386 miliar}} \times 100 = 15,03 \%$$

Catatan :

1. Nilai PDRB Sub Sektor Perdagangan Tahun 2016 sebesar Rp. 28.914 miliar
2. Nilai PDRB Sumatera Barat sebesar Rp. 192.386 miliar

Kinerja ini jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 14,68 persen, meningkat sebesar 0,35 persen atau 15,03 persen pada tahun 2016. Lebih lengkap realisasi kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 dan tahun 2016 tergambar pada tabel berikut.

Tabel 14
Realisasi Indikator Kinerja Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Sumatera Barat Tahun 2015-2016 (%)

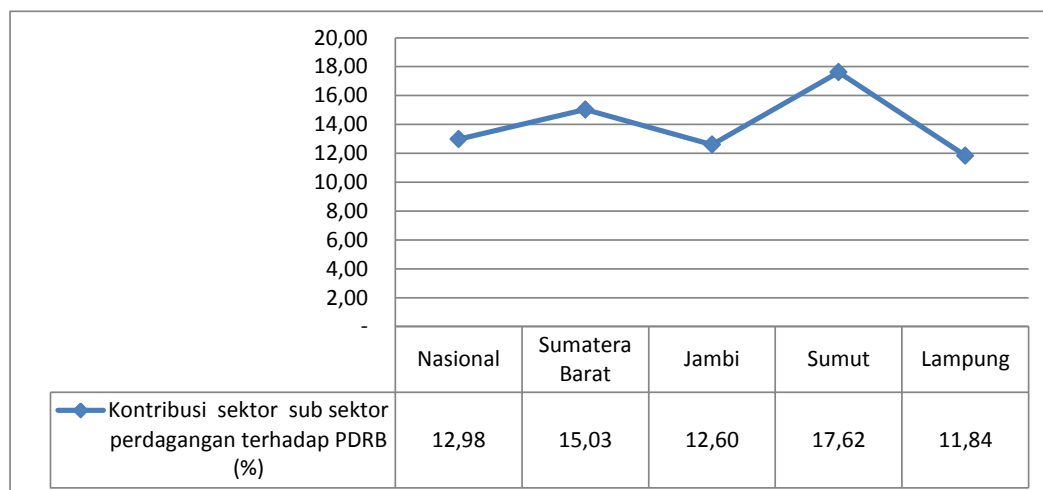
No.	Sub Sektor Perdagangan	Nilai Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (juta rupiah)		Kontribusi Tahun 2015	Kontribusi Tahun 2016
		2015	2016		
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya.	3.615.880,5	4.183.442,1	2,02	2,17
	2. Perdagangan Besar dan Eceran	22.631.961,7	24.731.001,2	12,66	12,85
Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHB)		26.247.842,24	28.914.443,30	14,68	15,03
PDRB Sumatera Barat (ADHB)		178.810.456,68	192.386.143,36	100,00	100,00

Sumber : BPS Sumatera Barat, data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai produksi sektor perdagangan pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Nilai produksi sektor perdagangan pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 26.247.842,24 juta, meningkat sebesar 10,6 persen atau Rp. 28.914.443,30 juta pada tahun 2016. Peningkatan ini juga diiringi dengan meningkatnya kontribusi sub sektor perdagangan terhadap total PDRB Sumatera Barat, dimana pada tahun 2015 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatera Barat tercatat sebesar 14,68 persen, meningkat sebesar 0,35 persen atau 15,03 persen pada tahun 2016.

Jika dibandingkan dengan beberapa provinsi tetangga (Provinsi Jambi, Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Utara) dan nasional, kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB di Sumatera Barat cenderung lebih tinggi, namun masih berada dibawah Provinsi Sumatera Utara. Data selengkapnya tergambar pada grafik berikut.

Grafik 4
Realisasi Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB dibandingkan dengan Provinsi Lain dan Nasional Tahun 2016



Sumber : BPS, data diolah

Peningkatan kontribusi sub sektor perdagangan di Sumatera Barat pada tahun 2016 lebih disebabkan karena adanya keterkaitan/ketergantungan dengan sektor lain. Ketergantungan tersebut ditentukan oleh besarnya input yang digunakan oleh suatu sektor untuk proses produksi dimana input tersebut dapat merupakan output dari sektor yang lain atau sektor itu sendiri. Sehingga adanya peningkatan produksi pada suatu sektor dapat mempengaruhi sektor yang lainnya. Dalam hal ini, berdasarkan data BPS Sumatera Barat pada tahun 2016 terjadi penurunan kontribusi terhadap PDRB Sumatera Barat pada sektor pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, sehingga berdampak positif terhadap kontribusi sub sektor perdagangan.

Meningkatnya kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatera Barat, berbanding terbalik dengan pertumbuhan sub sektor ini sendiri. Sebagaimana diketahui, berdasarkan catatan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat pertumbuhan sub sektor perdagangan melambat dibandingkan tahun 2015 yang disebabkan terbatasnya aktivitas perdagangan karena meningkatnya biaya operasional pelaku usaha seiring kenaikan tarif tenaga listrik pada awal Mei dan Juni 2016 serta berubahnya perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi dari penjualan melalui bentuk fisik berupa toko dan pasar, sekarang berubah ke format digital.

Agar terwujudnya peningkatan kontribusi sub sektor perdagangan terhadap total PDRB Sumatera Barat serta peningkatan pertumbuhan sub sektor perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan upaya melalui Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan beberapa kegiatan utama antara lain :

- Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
- Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk IKM Sumatera Barat;
- Peningkatan Promosi IKM di Sumatera Barat;
- Peningkatan Promosi IKM di Luar Sumatera Barat.

3.1.2.2 Indikator Kinerja Peningkatan Omset Pasar Rakyat (%)

Indikator kedua yang digunakan untuk menunjukkan capaian sasaran meningkatnya kinerja sektor perdagangan dalam dan luar negeri pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah peningkatan omset pasar rakyat. **Target peningkatan omset pasar rakyat tahun 2016 (tahun pertama Renstra 2016-2021) ditetapkan sebesar 5,5 persen, realisasinya tidak memenuhi target, yaitu hanya 4,28 persen. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 77,82 persen.** Realisasi indikator kinerja ini dihitung sebagai berikut.

$$\text{Peningkatan omset pasar rakyat (\%)} = \frac{\text{Rp. 8.110 miliar} - \text{Rp. 7.777 miliar}}{\text{Rp. 7.777 miliar}} \times 100 = 4,28 \%$$

Catatan :

1. Omset pasar rakyat Tahun 2016 sebesar Rp. 8.110 miliar
2. Omset pasar rakyat tahun 2015 sebesar Rp. 7.777 miliar

Di Sumatera Barat transaksi jual beli lebih banyak dilakukan di pasar rakyat. Pada tahun 2016 tercatat jumlah pasar rakyat di Sumatera Barat sebanyak 514 unit yang terdiri atas pasar permanen, pasar semi permanen dan pasar tanpa bangunan. Masyarakat Sumatera Barat yang pada umumnya adalah pedagang, lebih dominan berada di pasar rakyat. Saat ini pasar rakyat yang berkondisi baik tercatat sebanyak 133 unit pasar yang tersebar di 19 kabupaten/kota Sumatera Barat dengan omset penjualan selama tahun 2015 dan tahun 2016 sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 15
Realisasi Indikator Kinerja Omset Pasar Rakyat Tahun 2015-2016 (%)

No.	Kabupaten / Kota	Omset Tahun 2015 (Rp.)	Omset Tahun 2016 (Rp.)
1.	Kabupaten Pesisir Selatan	22.332.420.000	53.569.000.000
2.	Kabupaten Pasaman	333.480.000.000	334.570.000.000
3.	Kabupaten Padang Pariaman	86.880.000.000	89.200.000.000
4.	Kabupaten Solok	254.829.600.000	27.294.300.000
5.	Kabupaten Sijunjung	463.834.800.000	465.450.720.000
6.	Kabupaten Agam	436.524.000.000	725.544.000.000
7.	Kabupaten Tanah Datar	747.780.000.000	752.256.000.000
8.	Kabupaten Lima Puluh Kota	112.272.000.000	112.472.000.000
9.	Kabupaten Dharmasraya	134.952.000.000	134.989.200.000
10.	Kabupaten Solok Selatan	116.340.000.000	117.560.000.000
11.	Kabupaten Pasaman Barat	629.400.000.000	632.423.000.000
12.	Kabupaten Kep. Mentawai	648.000.000	653.000.000
13.	Kota Payakumbuh	267.120.000.000	271.620.000.000
14.	Kota Solok	329.220.000.000	329.350.000.000
15.	Kota Padang Panjang	900.000.000	960.000.000
16.	Kota Pariaman	57.024.000.000	57.410.000.000
17.	Kota Sawahlunto	45.600.000.000	45.632.000.000
18.	Kota Padang Panjang	2.072.700.000.000	2.281.200.000.000
19.	Kota Bukittinggi	1.665.600.000.000	1.678.500.000.000
	Jumlah	7.777.436.820.000	8.110.653.220.000

Sumber : Dinas Perindag Kab/Kota Sumatera Barat, data diolah.

Belum tercapainya peningkatan target omset pasar rakyat sebesar 5,5 persen pada tahun 2016 disebabkan beberapa faktor, antara lain :

- Pasar rakyat di Sumatera Barat masih bergelut dengan masalah internal pasar seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang masih terbatas dan kurang terpelihara yang menyebabkan konsumen enggan untuk berbelanja di pasar rakyat;
- Mulai berkembangnya pasar modern di Sumatera Barat (Supermarket dan minimarket).

Dalam rangka meningkatkan omset pasar rakyat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya melalui pelaksanaan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan utama pada tahun 2016 sebagai berikut :

- Penyusunan Data Pasar Tradisional di Sumatera Barat, untuk mendata kondisi pasar dalam rangka revitalisasi pasar rakyat;
- Penyelenggaraan Pasar Murah;
- Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditi Agro.

3.1.2.3 Indikator Kinerja Peningkatan Nilai Ekspor (%)

Target yang ditetapkan untuk peningkatan nilai ekspor non migas Sumatera Barat tahun 2016 adalah sebesar 1,5 persen, namun realisasinya mengalami penurunan sebesar 2,28 persen sehingga capaian sasaran strategis indikator ini adalah sebesar minus 152 persen. Nilai ekspor non migas Sumatera Barat tahun 2016 tercatat sebesar US\$ 1.708,1 juta, mengalami penurunan sebesar 2,28 persen bila dibandingkan dengan periode yang

sama pada tahun sebelumnya, dimana nilai ekspor non migas Sumatera Barat pada tahun 2015 tercatat sebesar US\$ 1.748 juta (sumber data : Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Barat No. 71/12/13/Th.XIX, 16 Januari 2017). Hasil dari indikator kinerja peningkatan nilai ekspor dihitung sebagai berikut.

$$\text{Peningkatan nilai ekspor (\%)} = \frac{1.708,1 - 1.748,0}{1.748} \times 100 = (2,28) \%$$

Catatan :

1. Nilai Ekspor Tahun 2016 sebesar US\$ 1.708,1 juta
2. Nilai Ekspor Tahun 2015 sebesar US\$ 1.748,0 juta

Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 tergambar pada tabel berikut.

Tabel 16
Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Nilai Ekspor Sumatera Barat
Tahun 2015-2016 (%)

No	Golongan Barang	Nilai FOB (Juta US\$)		% Perubahan Januari-Desember 2016 terhadap 2015
		Januari-Desember 2015	Januari-Desember 2016	
1	Lemak & minyak hewan /Nabati	1.207,7	1.177,1	(2,53)
2	Karet dan Barang dari Karet	362,7	358,9	(1,05)
3	Ampas/Sisa Industri Makanan	25,9	23,4	(9,42)
4	Bahan Bakar Mineral	12,9	15,3	18,79
5	Berbagai Produk Kimia	22,6	28,9	27,87
6	Sari Bahan Samak dan Celup	4,7	13,3	185,58
7	Kopi, Teh, Rempah-rempah	28,2	24,0	(14,94)
8	Garam, Belerang, Kapur	19,4	19,5	0,82
9	Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi-wangian	8,7	8,4	(3,51)
10	Bahan-bahan Nabati	13,2	21,0	59,41
	Total 10 Golongan Barang	1.705,8	1.689,8	(0,94)
	Lainnya	42,2	18,3	(56,67)
	Total Ekspor	1.748,0	1.708,1	(2,28)

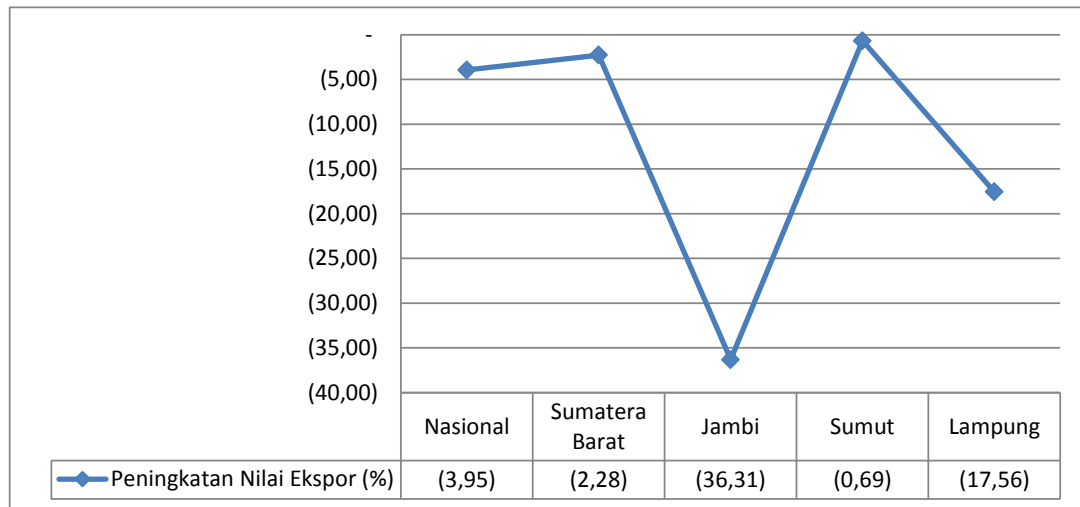
Sumber : BPS Sumatera Barat, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui kinerja ekspor non migas Sumatera Barat mengalami penurunan seiring dengan masih menurunnya permintaan negara tujuan ekspor dan terbatasnya harga komoditas. Kondisi ini terutama berasal dari penurunan ekspor karet dan CPO yang menjadi komoditas utama ekspor Sumatera Barat.

Jika dibandingkan dengan nilai ekspor beberapa provinsi tetangga (Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung) serta secara nasional, peningkatan nilai ekspor non migas Sumatera Barat masih sedikit lebih baik. Nilai ekspor Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 tercatat sebesar 7.075,4 juta US\$, mengalami penurunan sebesar 0,69 persen pada tahun 2016 atau sebesar 7.026,8 juta US\$. Nilai Ekspor Provinsi Lampung pada

tahun 2015 tercatat sebesar 3.871,41 juta US\$ dan mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 17,56 persen atau 3.191,73 juta US\$. Nilai Ekspor Provinsi Jambi pada tahun 2015 tercatat sebesar 2.635,7 juta US\$ dan mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 36,31 persen atau menjadi 1.678,6 juta US\$. Nilai ekspor secara nasional pada tahun 2015 tercatat sebesar 150.366,3 juta US\$ dan mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2016 yaitu menjadi 144.433,5 juta US\$ atau negatif 3,95 persen. Berikut perbandingan nilai ekspor non migas Sumatera Barat dengan beberapa provinsi tetangga dan nasional pada tahun 2016.

Grafik 5
Realisasi Peningkatan Nilai ekspor Sumatera Barat dibandingkan dengan Provinsi Lain dan Nasional Tahun 2016



Sumber : BPS, data diolah

Selain faktor eksternal sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, faktor penghambat peningkatan ekspor Sumatera Barat juga disebabkan oleh masalah internal yaitu :

1. Daya saing produk masih relatif rendah, yang meliputi mutu produk, kemasan, standar, merek barang olahan.
2. Kedatangan kapal yang belum sesuai kebutuhan pelaku ekspor;
3. Diversifikasi produk belum berkembang, masih didominasi barang setengah jadi;
4. Negara tujuan ekspor sebahagian besar masih terpaut ke negara tujuan tradisional;
5. Kapasitas produksi terbatas dan tidak kontinyu.

Untuk meningkatkan kinerja ekspor non migas Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Melakukan pemberdayaan terhadap pelaku IKM (teknis dan permodalan) sehingga produk bisa lebih berkualitas, memproduksi secara kontinyu, memenuhi standar yang ditentukan, merek terdaftar, memiliki label halal, dan kemasan yang lebih baik;
2. Pengembangan Produk dan Akses Pasar melalui penciptaan brand, identifikasi potensi ekspor, dan pengembangan produk;

3. Melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non tradisional, melalui kegiatan-kegiatan promosi (pameran/misi dagang) untuk memperkenalkan produk-produk potensial Sumatera Barat ke wilayah pasar tersebut.
4. Pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) barang dari negara mitra FTA, guna melindungi produk dalam negeri;
5. Meningkatkan upaya fasilitasi kepada dunia usaha/UKM eksportir dalam bentuk pelatihan-pelatihan ekspor, pengembangan pasar komoditi Sumatera Barat ke luar negeri, dan pelatihan-pelatihan teknik peningkatan daya saing lainnya. Disamping itu perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus tentang regulasi-regulasi baru yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya ketentuan dan peraturan-peraturan yang terbaru di bidang ekspor.

Wujud nyata dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan nilai ekspor non migas di Sumatera Barat diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan dengan kelompok sasaran kegiatan yang terdiri atas UKM calon eksportir, eksportir dan aparatur yang menangani urusan perdagangan yang berasal dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan hasil :

1. Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman UKM, aparatur dan calon eksportir dalam rangka mengembangkan serta meningkatkan nilai ekspor Sumatera Barat melalui kegiatan pelatihan dan temu usaha;
2. Tersedianya data komoditi ekspor kab/kota Sumatera Barat sebagai acuan dalam pengembangan komoditi ekspor di Sumatera Barat melalui kegiatan penyusunan data perdagangan luar negeri;
3. Meningkatnya pengetahuan aparatur dan dunia usaha tentang prosedur dan kegunaan Surat Keterangan Asal (SKA) melalui kegiatan sosialisasi;
4. Terbukanya peluang pasar ekspor bagi UKM potensial ekspor dalam rangka meningkatkan nilai ekspor Sumatera Barat melalui keikutsertaan dalam kegiatan Pameran Produk Ekspor kedalam dan luar negeri.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis kedua, yaitu Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dalam dan luar negeri dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Persentase kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB, Peningkatan omset pasar rakyat dan Peningkatan nilai ekspor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 program urusan Perdagangan yaitu:

1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
 - a. Tujuan Program, Pagu Anggaran dan Realisasi.
Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi perdagangan dan meningkatkan pangsa pasar dalam negeri dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Pagu anggaran pada program ini sebesar Rp. 3.593.934.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.355.313.904,- atau 93,36 persen. Pada program ini terdapat 12 (dua belas) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Data Pasar Tradisional di Sumatera Barat, Kegiatan Monev Distribusi Pupuk Bersubsidi, Kegiatan Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk IKM Sumbang, Kegiatan Temu Usaha Pengembangan Pasar bagi Industri Kecil, Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Kegiatan

Penyelenggaraan Pasar Murah, Kegiatan Peningkatan Promosi IKM dan Kegiatan Pengembangan Pasar Komoditi Lokal melalui Pasar Lelang Lainnya.

b. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan:

- Kegiatan yang ada dalam program ini belum optimal dalam rangka pencapaian tujuan program;
- Pelaksanaan temu usaha dagang dengan provinsi mitra dirasa belum optimal dikarenakan kurang siapnya provinsi mitra dalam melaksanakan temu usaha dengan kita;

Upaya Pemecahan Masalah:

- Menciptakan kegiatan-kegiatan yang tepat dalam mendukung pencapaian tujuan program. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat akan lebih selektif dalam mengusulkan kegiatan dalam rangka mengembangkan perdagangan dalam negeri;
- Guna menjamin tingkat keberhasilan pelaksanaan temu usaha dengan provinsi mitra, diharapkan pelaksanaannya dilakukan setelah data mitra usaha di kedua provinsi tersedia.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

a. Tujuan Program, Pagu Anggaran dan Realisasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekspor daerah melalui peningkatan pemahaman calon eksportir, eksportir dan ASN terkait tentang prosedur dan kebijakan ekspor serta peningkatan mutu komoditi ekspor melalui penerbitan sertifikat mutu produk ekspor. Pagu anggaran pada program ini sebesar Rp. 998.292.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 828.371.874,- atau 82,98 persen. Program ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan yaitu Kegiatan Pelatihan Prosedur Ekspor dan Impor bagi Aparat Perdagangan dan UKM, Kegiatan Temu Usaha dan Sosialisasi Pengembangan Produk Komoditi Ekspor, Kegiatan Identifikasi Produk Impor di Sumbar, Kegiatan Pengujian Mutu Barang Ekspor, Kegiatan Pengawasan Mutu Komoditi Ekspor, dan Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Komoditi Ekspor.

b. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan:

- Masih sulitnya meningkatkan nilai ekspor, karena komoditi yang diekspor masih dalam bentuk bahan mentah;
- Masih sulitnya mengendalikan laju impor, dimana impor masih dominan pada bahan baku, bahan penolong dan komoditi pertanian.

Upaya Pemecahan Masalah:

- Berusaha untuk mengembangkan komoditi potensial ekspor yang berada di kabupaten/kota, bekerjasama dengan beberapa instansi terkait;
- Perlu upaya strategis untuk meningkatkan nilai ekspor, berupa pembukaan pasar ekspor baru serta peningkatan daya saing komoditi potensial untuk diekspor;
- Melakukan temu bisnis dengan provinsi lain guna menekan impor bahan baku, bahan penolong dan komoditi agro yang tersedia di nusantara.

Adapun lebih lengkap realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016 tergambar pada tabel berikut.

Tabel 17
Realisasi Program dan Kegiatan 2016
Pada Sasaran Strategis Dua

Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian
SS 2 Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dalam dan luar negeri		Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	3.593.934.650	3.355.313.904	93,36
	- Persentase kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri	83.185.000	80.146.000	96,35
		Temu Usaha Pengembangan Pasar bagi Industri Kecil.	124.194.500	119.695.500,00	96,38
		Bimbingan Teknis dan Pengawasan Teknis kepada Aparat tentang SIUP dan TDP Kab/Kota Sumatera Barat.	89.992.000	69.369.200	77,08
		Peningkatan Promosi IKM di Sumatera Barat	78.531.000	77.361.000	98,51
		Peningkatan Promosi IKM di Luar Sumbang	762.173.700	630.533.600	82,73
		Peningkatan Promosi dan Pemasaran Produk IKM Sumbang	69.731.400	69.373.544	99,49
		Monitoring Distribusi Pupuk Bersubsidi	38.103.050	17.437.800	45,76
		Pelaksanaan Ikon Inacraft ke 18.	2.038.152.000	2.027.388.860	99,47
	- Persentase omset pasar rakyat (%)	Penyusunan Data Pasar Tradisional di Sumatera Barat.	73.512.000	54.102.000	73,60
		Penyelenggaraan Pasar Murah	65.083.000	63.083.000	96,93
		Pengembangan Pasar Komoditi Lokal melalui Pasar Lelang Luar Provinsi.	99.922.000	79.368.400	79,43
		Pelaksanaan Pasar Lelang Forward di Sumatera Barat	71.355.000	67.455.000	94,53
	- Peningkatan Nilai Ekspor (%)	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	998.292.000	828.371.874	82,98
		Pelatihan Prosedur Ekspor dan Imper bagi Aparat Perdagangan dan UKM	63.437.000	50.864.700	80,18
		Temu Usaha dan Sosialisasi Pengembangan Produk Komoditi Ekspor	201.319.000	141.646.050	70,36
		Sosialisasi Mutu Komoditi Ekspor	46.062.000	44.322.000	96,22
		Identifikasi Produk Impor di Sumbang	60.039.000	54.589.000	90,92
		Pengujian Mutu Barang Ekspor	400.000.000	374.927.500	93,73
		Re-Akreditasi Laboratorium	86.000.000	67.758.225	78,79
		Pengawasan Mutu Komoditi	68.292.500	66.316.699	97,11
		Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Komoditi Ekspor	73.142.500	27.947.700	38,21

3.1.3 Sasaran Strategis Tiga

Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga

Untuk dapat mencapai misi kedua, yaitu mewujudkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing serta perlindungan konsumen dan guna mencapai tujuan kedua pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing maka ditetapkan sasaran strategis yang ketiga, yaitu meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga.

Dalam sasaran strategis yang ketiga ini, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang dapat diukur. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ketiga, serta analisa dari satu indikator kerjanya, akan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 18
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tiga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
3.	Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga.				100,00	Sangat Baik
		3.1 Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib, label, MKG, distribusi, jasa, sertifikat, registrasi) (%)	3,57	3,57	100,00	Sangat Baik

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat

3.1.3.1 Indikator Kinerja Persentase Produk dan Jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI Wajib)

Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib, label, MKG) pada tahun 2016 tercatat sebesar 3,57 persen atau memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,57 persen, sehingga persentase capaian kerjanya sebesar 100 persen. Realisasi indikator kinerja ini dihitung sebagai berikut.

$$\text{Persentase Produk dan Jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib, label, MKG)} = \frac{4}{112} = 3,57 \%$$

Catatan :

1. Produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib) tahun 2016 : 4 produk
2. Produk dan jasa yang wajib untuk diawasi tahun 2016 berjumlah 112 produk

Kinerja ini jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 7,48 persen, mengalami penurunan sebesar 3,91 persen atau 3,57 persen pada tahun 2016. Penurunan ini terjadi karena ketersediaan anggaran pada kegiatan pengawasan barang beredar yang sangat terbatas. Lebih lengkap realisasi kinerja persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib, label, MKG) pada tahun 2015 dan tahun 2016 tergambar pada tabel berikut.

Tabel 19
Realisasi Indikator Kinerja Persentase Produk dan Jasa yang diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan (SNI Wajib) Tahun 2015-2016 (%)

Indikator Kinerja	Realisasi	
	2015	2016
Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib, label, MKG, distribusi, jasa, sertifikat, registrasi) (%)	7,48	3,57
a. Produk SNI wajib yang diawasi tahun oleh Dinas Perindag Sumbar.	8	4
b. Total Produk yang harus diawasi (SNI wajib)	107	112

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar

Pengawasan barang beredar adalah salah satu tupoksi yang dijalankan secara serius oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, dimana pada Renstra Tahun 2016-2021 ditargetkan untuk mengawasi barang beredar (SNI wajib) sebanyak 54 produk SNI wajib. Terjadinya penurunan jumlah produk SNI wajib yang diawasi tahun 2016 disebabkan pengurangan anggaran untuk kegiatan Pengawasan terhadap Barang Beredar di Pasaran.

Sebagaimana diketahui, dalam rangka perlindungan konsumen dan pasar dalam negeri serta diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sejak tahun 2015, perlu lebih ditingkatkan volume pengawasan barang beredar, terutama untuk produk impor yang tidak berstandar serta yang belum berlabel wajib bahasa Indonesia pada produknya. Dapat kami informasikan pula parameter pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat meliputi :

1. SNI Wajib dan SNI sukarela;
2. Wajib label berbahasa Indonesia;
3. Manual Kartu Garansi;
4. Barang yang diatur tata niaganya.

Pada tahun 2016 telah dilakukan pengawasan terhadap 25 produk dan jasa di 19 kabupaten/kota Sumatera Barat dengan uraian sebagai berikut :

1. Produk SNI wajib sebanyak 4 jenis produk yaitu mainan anak, korek api gas, AMDK dan Garam beryodium;
2. Wajib Label sebanyak 10 produk
3. Manual Kartu Garansi sebanyak 10 produk;
4. Barang yang diatur tata niaganya sebanyak 1 produk.

Temuan pengawasan terhadap barang beredar di pasaran ini meliputi : air mineral belum bertanda SNI pada kemasannya, setrika tidak dilengkapi kartu garansi, kipas angin tidak berkartu garansi, produk melamin rumah tangga yang tidak memiliki SNI.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat antara lain :

- Produk yang tidak ber SNI, pemiliknya dipanggil untuk klarifikasi dan barang tidak boleh dijual;
- Produk yang tidak memiliki kartu garansi tidak boleh dijual dan harus didaftarkan produknya pada Kementerian Perdagangan

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ketiga, yaitu Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga dengan 1 satu) indikator kinerja yaitu Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Perlindungan Konsumen. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016 tergambar pada tabel berikut.

Tabel 20
Realisasi Program dan Kegiatan 2016
Pada Sasaran Strategis Tiga

Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian
SS 3 Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga		Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	1.169.249.860	986.664.099	84,38
	- Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib, label, MKG, distribusi, jasa, sertifikat, registrasi) (%)	Pengawasan Barang Beredar di Pasaran (SNI Wajib, Label, dan Barang yang diatur tata niaganya).	212.651.600	172.232.000	80,99
		Pelaksanaan Pengawasan Kemetrolagian	151.900.000	121.181.000	79,78
		Sosialisasi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	98.648.100	80.906.100	82,01
		Pengawasan Mutu Produk Industri	161.690.000	157.440.000	97,37
		Pelaksanaan Tertib Ukur Melalui Tera / Tera Ulang Alat UTTP di Kab/Kota Sumatera Barat.	333.631.000	276.271.436	82,81
		Persiapan Pasar Tertib Ukur di Pasar dan Daerah Tertib Ukur di 2 (dua) Pasar di Sumatera Barat	130.617.560	112.016.463	85,76
		Pelaksanaan Verifikasi alat standar Laboratorium kemetrolagian	80.111.600	66.617.100	83,16

Melalui pelaksanaan Program Peningkatan Perlindungan Konsumen telah dilakukan pengawasan terhadap barang beredar yang ada di 19 kabupaten/kota serta pengawasan terhadap mutu produk industri. Dari total 112 buah produk yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib), pada tahun 2016 sesuai dengan ketersediaan anggaran pada program ini, telah dilakukan pengawasan terhadap 4 jenis produk SNI wajib yaitu mainan anak, korek api gas, AMDK dan garam beryodium.



Permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Perlindungan Konsumen adalah:

Permasalahan:

- Masyarakat belum menyadari akan hak-haknya sebagai konsumen sehingga belum ada suatu kemauan untuk memberi pelaporan bila terjadi kecurangan takaran dan dimana harus melaporkan;
- Belum adanya partisipasi dari dinas Perindustrian Kabupaten/Kota karena keterbatasan dana, sarana dan SDM, hal ini menyebabkan pengawasan barang beredar menjadi terbatas, khususnya barang dari China;
- Penerapan standardisasi mutu produk masih terkendala oleh keterbatasan informasi dan pengetahuan masyarakat tentang informasi standardisasi produk.

Upaya Pemecahan Masalah:

- Sosialisasi terhadap standardisasi harus terus dilakukan sampai muncul kesadaran bagi pelaku usaha untuk memproduksi barang maupun jasa sesuai dengan standar kesehatan, keselamatan maupun standar ukur dan masyarakat mendapatkan informasi tentang hak-haknya dalam mengkonsumsi barang maupun jasa ;
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota perlu berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan barang beredar melalui penyediaan dana pengawasan maupun peningkatan SDM pengawasan;
- Sosialisasi Aku Cinta Indonesia (ACI), perlu terus dilakukan kepada para pelajar. Selain itu Pengawasan terhadap peredaran komoditi impor China akan terus dilakukan untuk menjamin bahwa barang yang beredar sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.



3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

Analisa akuntabilitas keuangan pada laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat diuraikan atas beberapa bagian yang memuat tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016 dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

3.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 ditargetkan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari unit-unit penghasil yang ada dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan target sebesar Rp. 1.239.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.286.223.302,- (103,81 %). Adapun sumber atau unit penghasil dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 21
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

No.	URAIAN/Itemization	2016		%
		TARGET/target	REALISASI/Realization	
	Pendapatan Asli Daerah/ Local Government Original Receipt	1.284.000.000	1.025.687.885	79,88
I.	Pendapatan Retribusi Daerah/ Local Retribution Receipt	1.284.000.000	1.025.687.885	79,88
	Retribusi Jasa Umum	860.000.000	615.741.680	71,60
	Retribusi Tera	410.000.000	332.826.680	81,18
	Penerimaan Uang Perjalanan Tera ke Perusahaan	450.000.000	282.915.000	62,87
	Retribusi Jasa Usaha	424.000.000	409.946.205	96,69
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	424.000.000	409.946.205	96,69
	UPTD BPMB	400.000.000	388.343.905	97,09
	- Pengujian Contoh	175.000.000	176.494.905	100,85
	- Pengambilan Contoh	75.000.000	50.264.000	67,02
	- Kalibrasi Peralatan	125.000.000	132.085.000	105,67
	- Penerimaan Uang Perjalanan Kalibrasi	25.000.000	29.500.000	118,00
	UPTD Balai Perakayasaan	24.000.000	21.602.300	90,01
	- Jasa Pengolahan Rotan	16.000.000	11.978.700	74,87
	- Jasa Pengolahan Logam	4.000.000	3.897.600	97,44
	- Jasa Pemakaian Workshop di UPTD	4.000.000	5.726.000	143,15
II.	Lain-Lain PAD yang Sah/ Other Illegal Receipt	-	-	

Sumber : Sub Bagian Keuangan , Sekretariat Disperindag Prov. Sumbar

3.2.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2016 mendapat pagu anggaran APBD sebesar Rp. 35.397.003.208,- untuk membiayai kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan industri dan perdagangan di Sumatera Barat dengan realisasi sebesar Rp. 33.095.250.928,- (93,50%). Berikut terinci pagu dana dan realisasi tahun 2016 dimaksud :

1. Belanja Langsung, sebesar Rp. 21.229.179.612,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.378.733.445,- (91,28%). Belanja Langsung terdiri dari :
 - a. Belanja Langsung Pokok, sebesar Rp. 11.033.028.402,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.378.258.845,- (94,07%) yang terdiri atas 5 program dan 30 kegiatan.
 - b. Belanja Langsung Urusan, sebesar Rp. 10.196.151.210,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.000.474.600,- (88,27%) yang terdiri atas 6 program (Sektor Industri 2 program, Sektor Perdagangan 3 program dan 1 program penunjang) dan 51 kegiatan.
2. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 14.167.823.596,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.716.517.483,- (96,81%).

Melalui tabel berikut dapat dilihat realisasi fisik dan keuangan belanja langsung pokok pada tahun anggaran 2016 :

Tabel 22
Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

No.	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN INI	REALISASI			KETERANGAN
			FISIK (%)	KEUANGAN		
	BELANJA DAERAH	35.397.003.208	98,01	33.095.250.928	93,50	
	BELANJA LANGSUNG	21.229.179.612	96,02	19.378.733.445	91,28	
	BELANJA LANGSUNG POKOK	11.033.028.402	95,00	10.378.258.845	94,07	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.472.972.540	100,00	2.111.926.784	85,40	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.095.000	100,00	42.612.915	78,77	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	475.350.000	100,00	325.799.586	68,54	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	341.586.000	100,00	328.140.125	96,06	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	438.086.000	100,00	415.135.300	94,76	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	154.018.225	100,00	143.968.555	93,48	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.000.000	100,00	74.255.450	82,51	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	16.785.325	100,00	16.701.400	99,50	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.016.000	100,00	25.767.600	99,05	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	69.000.000	100,00	63.460.000	91,97	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	333.863.390	100,00	288.715.603	86,48	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

No.	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN INI	REALISASI		KETERANGAN	
			FISIK (%)	KEUANGAN		
	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	61.415.200	100,00	58.008.000	94,45	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	381.561.400	100,00	303.657.250	79,58	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	17.996.000	100,00	16.930.000	94,08	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	13.200.000	100,00	8.775.000	66,48	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	7.722.665.512	100,00	7.666.625.262	99,27	
	Pembangunan Gedung Kantor	5.874.338.000	100,00	5.861.160.700	99,78	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	380.150.000	100,00	380.150.000	100,00	
	Pengadaan Meubeler	348.565.012	100,00	347.065.000	99,57	
	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	57.000.000	100,00	56.900.000	99,82	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	109.846.000	100,00	100.439.210	91,44	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.476.500	100,00	28.375.000	70,10	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	30.600.000	100,00	19.800.000	64,71	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	82.690.000	100,00	77.274.352	93,45	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	799.000.000	100,00	795.461.000	99,56	
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	99.900.000	100,00	95.137.000	95,23	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	99.900.000	100,00	95.137.000	95,23	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	293.376.000	63,14	128.365.106	43,75	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	36.336.000	50,00	5.330.000	14,67	Rendahnya serapan anggaran dan fisik kegiatan disebabkan pemakaian anggaran sesuai dengan undangan yang masuk ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	257.040.000	65,00	123.035.106	47,87	Rendahnya serapan anggaran dan fisik kegiatan disebabkan pemakaian anggaran sesuai dengan bimbingan teknis yang bisa diikuti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sesuai kebutuhan dan tupoksi.
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	444.114.350	100,00	376.204.693	84,71	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.427.000	100,00	15.427.000	100,00	
	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	30.174.750	100,00	22.162.750	73,45	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	41.360.000	100,00	30.990.487	74,93	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
	Penatausahaan Keuangan SKPD	357.152.600	100,00	307.624.456	86,13	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

No.	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN INI	REALISASI			KETERANGAN
			FISIK (%)	KEUANGAN		
	BELANJA LANGSUNG URUSAN	10.196.151.210	97,04	9.000.474.600	88,27	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN INDUSTRI	886.502.000	91,89	650.703.832	73,40	
	Pengembangan Tenun Sumatera Barat	240.366.000	100,00	225.458.200	93,80	Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya efisiensi pada perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
	Pengembangan Produk Bordir/Sulaman Sumatera Barat.	479.582.000	85,00	280.126.100	58,41	Rendahnya serapan anggaran dan fisik kegiatan disebabkan tidak terlaksananya keikutsertaan pada event International Ethical Fashion akibat adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
	Pengembangan Desain Produk dari Kulit.	94.075.000	100,00	91.527.200	97,29	
	Koordinasi Pengembangan Minyak Atsiri	72.479.000	100,00	53.592.332	73,94	Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	3.174.462.500	98,14	2.864.130.891	90,22	
	Pelatihan Teknis dan Diversifikasi Produk Minyak Atsiri.	68.095.000	100,00	63.373.623	93,07	
	Pembinaan Kelompok Industri Berbasis Coklat	72.500.000	100,00	69.874.000	96,38	
	Pembinaan Pengelolaan Limbah Cair kepada Pelaku IKM	66.062.000	100,00	59.583.000	90,19	Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya sisa belanja jasa laboratorium.
	Pelatihan Ketrampilan Industri Perkapalan Rakyat.	146.311.000	100,00	86.862.800	59,37	Rendahnya serapan anggaran disebabkan tidak terlaksananya kegiatan magang bagi IKM ke Jawa Timur akibat adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
	Pelatihan Pembuatan Alsintan	366.761.500	100,00	362.594.500	98,86	
	Pembuatan Prototipe Teknologi Tepat Guna Alsintan	394.106.000	85,00	295.643.100	75,02	Rendahnya serapan anggaran dan fisik kegiatan disebabkan tidak terlaksananya sosialisasi prototipe di 5 kab/kota akibat adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
	Pelatihan Penggunaan Teknologi Tepat Guna bagi IKM	125.000.000	100,00	122.480.600	97,98	
	Pelatihan Teknik Pengelasan Alsintan	240.000.000	100,00	226.243.600	94,27	Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
	Pelatihan Teknis dan Pengembangan Disain Kerajinan Kayu dan Bambu.	95.549.000	100,00	94.447.000	98,85	
	Pelatihan Wirausaha Baru di Bidang Industri	117.580.000	100,00	114.394.000	97,29	
	Sosialisasi Penerbitan dan Pemanfaatan Izin Usaha Industri bagi IKM dan Aparatur	60.000.000	100,00	48.516.000	80,86	Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya sisa belanja pada rekening makan dan minum kegiatan.
	Pelatihan Produksi Barang dari Bahan Baku Karet (Compound)	158.114.000	100,00	141.318.300	89,38	Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya sisa pembelian bahan praktek, transportasi peserta dan transportasi instruktur.
	Pembinaan Industri Kecil Menengah Berbasis Hasil Laut dan Perikanan.	215.278.000	100,00	207.044.700	96,18	
	Pengembangan Industri Minuman	86.075.000	100,00	79.697.000	92,59	Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya sisa transportasi peserta (menyesuaikan zona) dan efisiensi perjalanan dinas.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

No.	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN INI	REALISASI			KETERANGAN
			FISIK (%)	KEUANGAN		
	Pembinaan dan Pengembangan Produk Kerajinan Sumbang	535.080.000	100,00	501.280.461	93,68	Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya efisiensi pada perjalanan dinas.
	Pengembangan Industri Kerajinan Batu Permata (Batu Akik)	58.000.000	100,00	56.243.000	96,97	
	Sosialisasi Kemasan, Sertifikasi Halal, MD dan SNI bagi IKM	99.951.000	100,00	96.484.100	96,53	
	Penyebarluasan Informasi HKI dan Bantuan Pendaftaran Merk.	120.000.000	100,00	114.996.000	95,83	
	Penyusunan Naskah Akademik Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah	150.000.000	100,00	123.055.107	82,04	Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya efisiensi perjalanan dinas, efisiensi belanja makan dan minum kegiatan serta penyesuaian honorarium tenaga ahli.
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	373.710.200	100,00	315.290.000	84,37	
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah	373.710.200	100,00	315.290.000	84,37	Penggunaan anggaran kegiatan intensifikasi untuk Metrologi hanya bisa digunakan sampai 30 September, sehubungan dengan berakhirnya operasional UPTD Metrologi per 1 Oktober 2016.
	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.169.249.860	100,00	986.664.099	84,38	
	Pelaksanaan Pengawasan Kemetrolgian	151.900.000	100,00	121.181.000	79,78	Rendahnya serapan anggaran disebabkan efisiensi penginapan (penginapan dibayarkan riil cost 30%) serta rasionalisasi perjalanan dinas akibat adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
	Pengawasan Barang Beredar di Pasaran (SNI Wajib, Label, dan Barang yang diatur tata niaganya).	212.651.600	100,00	172.232.000	80,99	Rendahnya serapan anggaran disebabkan efisiensi penginapan (penginapan dibayarkan riil cost 30%) serta rasionalisasi perjalanan dinas akibat adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
	Sosialisasi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	98.648.100	100,00	80.906.100	82,01	Rendahnya serapan anggaran disebabkan efisiensi tempat pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian honorarium narasumber.
	Pelaksanaan Tertib Ukur Melalui Tera / Tera Ulang Alat UTPP di Kab/Kota Sumatera Barat.	333.631.000	100,00	276.271.436	82,81	Rendahnya serapan anggaran disebabkan efisiensi penginapan (penginapan dibayarkan riil cost 30%) serta rasionalisasi perjalanan dinas akibat adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
	Persiapan Pasar Tertib Ukur di Pasar dan Daerah Tertib Ukur di 2 (dua) Pasar di Sumatera Barat	130.617.560	100,00	112.016.463	85,76	Rendahnya serapan anggaran disebabkan efisiensi penginapan (penginapan dibayarkan riil cost 30%) serta rasionalisasi perjalanan dinas akibat adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
	Pelaksanaan Verifikasi Alat Standar Laboratorium kemetrolgian	80.111.600	100,00	66.617.100	83,16	Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya sisa belanja pemeliharaan, sisa belanja bahan/material dan BBM.
	Pengawasan Mutu Produk Industri	161.690.000	100,00	157.440.000	97,37	
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	998.292.000	95,42	828.371.874	82,98	
	Pelatihan Prosedur Ekspor dan Impor Bagi Aparat Perdagangan dan UKM	63.437.000	100,00	50.864.700	80,18	Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya sisa transportasi peserta (menyesuaikan zona) dan sisa honorarium narasumber (dari 2 orang narasumber menjadi 1 orang narasumber).



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

No.	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN INI	REALISASI			KETERANGAN
			FISIK (%)	KEUANGAN		
	Temu Usaha dan Sosialisasi Pengembangan Produk Komoditi Ekspor.	201.319.000	90,00	141.646.050	70,36	Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya sisa transportasi peserta (menyesuaikan zona), penyesuaian honorarium narasumber dan tidak terlaksananya 1 sub kegiatan temu usaha akibat adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
	Sosialisasi Mutu Komoditi Ekspor	46.062.000	100,00	44.322.000	96,22	
	Identifikasi Produk Impor di Sumbar	60.039.000	100,00	54.589.000	90,92	Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya efisiensi penginapan (penginapan dibayarkan riil cost 30%) serta efisiensi makanan dan minum rapat.
	Pengujian Mutu Barang Ekspor	400.000.000	100,00	374.927.500	93,73	
	Re-Akreditasi Laboratorium	86.000.000	100,00	67.758.225	78,79	Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya efisiensi biaya Asesor.
	Pengawasan Mutu Komoditi	68.292.500	100,00	66.316.699	97,11	
	Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Komoditi Ekspor	73.142.500	65,00	27.947.700	38,21	Rendahnya serapan anggaran dan fisik kegiatan disebabkan tidak terlaksananya bimbingan teknis di Kota Pariaman akibat adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	3.593.934.650	96,79	3.355.313.904	93,36	
	Penyusunan Data Pasar Tradisional di Sumatera Barat.	73.512.000	75,00	54.102.000	73,60	Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya sisa cetak buku.
	Movev Distribusi Pupuk Bersubsidi	38.103.050	65,00	17.437.800	45,76	Rendahnya serapan anggaran dan fisik kegiatan disebabkan tidak terlaksananya 1 kali movev ke 17 kab/kota akibat adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
	Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk IKM Sumbar.	69.731.400	100,00	69.373.544	99,49	
	Temu Usaha Pengembangan Pasar bagi Industri Kecil.	124.194.500	100,00	119.695.500	96,38	
	Bimbingan Teknis dan Pengawasan Teknis kepada Aparat tentang SIUP dan TDP Kab/Kota Sumatera Barat.	89.992.000	100,00	69.369.200	77,08	Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya efisiensi perjalanan dinas.
	Peningkatan Promosi IKM di Sumatera Barat	78.531.000	100,00	77.361.000	98,51	
	Peningkatan Promosi IKM di Luar Sumatera Barat	762.173.700	91,00	630.533.600	82,73	Rendahnya serapan anggaran dan fisik kegiatan disebabkan tidak terlaksananya 1 kali pameran akibat adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri	83.185.000	100,00	80.146.000	96,35	
	Penyelenggaraan Pasar Murah	65.083.000	100,00	63.083.000	96,93	
	Pengembangan Pasar Komoditi Lokal melalui Pasar Lelang Luar Provinsi.	99.922.000	85,00	79.368.400	79,43	Rendahnya serapan anggaran dan fisik kegiatan disebabkan tidak terlaksananya 1 kali lelang ke Jambi akibat adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
	Pelaksanaan Pasar Lelang Forward di Sumatera Barat	71.355.000	100,00	67.455.000	94,53	
	Pelaksanaan Icon Inacraft ke 18.	2.038.152.000	100,00	2.027.388.860	99,47	

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program, Sekretariat Disperindag Prov. Sumbar : diolah

Dari tabel diatas diketahui, terdapat 3 program yang mempunyai realisasi fisik kurang dari 100%, yaitu pada Program Pengembangan Perwilayahan (91,89%), Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (98,14%), Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri (94,32%) dan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (96,84%) dengan 7 jenis kegiatan, yaitu :

1. Pengembangan Produk Bordir/Sulaman Sumatera Barat, realisasi fisik 85% dan realisasi keuangan 58,41%. Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak terlaksana yaitu keikutsertaan pada International Ethnical Fashion yang disebabkan adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
2. Pembuatan Prototype Teknologi Tepat Guna Alsintan, realisasi fisik 85% dan realisasi keuangan 75,02%. Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Sosialisasi Prototype bagi 5 kab/kota yang disebabkan adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
3. Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Komoditi Ekspor, realisasi fisik 50% dan realisasi keuangan 38,21%. Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Komoditi Ekspor di Kota Pariaman yang disebabkan adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
4. Penyusunan Data Pasar Tradisional di Sumatera Barat, realisasi fisik 75% dan realisasi keuangan 73,60%.
5. Monev Distribusi Pupuk Bersubsidi, realisasi fisik 70% dan realisasi keuangan 45,76%. Pada kegiatan ini tidak terlaksana 1 (satu) kali monev ke 18 kab/kota yang disebabkan adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
6. Peningkatan Promosi IKM di Luar Sumatera Barat, realisasi fisik 91% dan realisasi keuangan 82,73%. Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak terlaksana yaitu keikutsertaan pada Pameran Nusantara Expo yang disebabkan adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
7. Pengembangan Pasar Komoditi Lokal Melalui Pasar Lelang Luar Provinsi, realisasi fisik 85% dan realisasi keuangan 79,43%. Pada kegiatan ini terdapat 5 kali lelang dan hanya terlaksana 4 kali lelang. Tidak terlaksananya 1 kali lelang tersebut disebabkan karena adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.

Realisasi serapan anggaran yang kurang dari 95% terdapat pada 52 kegiatan. Rendahnya serapan anggaran ini disebabkan karena :

1. Kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah yang mengakibatkan tidak terlaksananya beberapa kegiatan.
2. Rasionalisasi akomodasi kegiatan.
3. Rasionalisasi perjalanan dinas.
4. Pemakaian sesuai dengan kebutuhan.

3.2.3 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015

Melalui anggaran dekonsentrasi (APBN) Dinas Perindustrian mendapat anggaran sebesar Rp. 7.528.313.000,- yang bersumber dari 4 DIPA untuk membiayai kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan industri dan perdagangan di Sumatera Barat dengan realisasi sebesar Rp. 4.481.022.031,- (59,52%). Berikut terinci pagu dana tahun 2016 dimaksud :

1. DIPA Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Rp. 973.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 562.057.100,- (57,77%).

Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya save blocking (penghematan anggaran) dari Kementerian Perdagangan RI sebesar Rp.211.582.000,- (21,75 % dari pagu anggaran).

2. DIPA Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Rp. 2.015.662.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.607.160.700,- (79,73%).
Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya save blocking (penghematan anggaran) dari Kementerian Perdagangan RI sebesar Rp.124.596.000,- (6,18 % dari pagu anggaran).
3. DIPA Penyebaran dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I Rp. 4.199.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.971.153.231,- (46,94%).
Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya save blocking (penghematan anggaran) dari Kementerian Perindustrian RI sebesar Rp.2.162.663.000 (51,50 % dari pagu anggaran).
4. DIPA Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro Rp. 340.651.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 340.651.000,- (100%).

3.3 PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH TAHUN 2016

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat ikut menunjang keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperoleh penghargaan. Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2016 adalah Penghargaan Cinta Karya Anak Bangsa (Juara 2) dari Kementerian Perindustrian RI atas komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menggunakan produk dalam negeri.



Sumber : Dokumentasi Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai Instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan di Sumatera Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berusaha menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dengan baik. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016, secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Dari Laporan Kinerja pada tahun 2016 ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengacu pada 3 sasaran yang diturunkan kedalam 8 indikator, telah berhasil dicapai sebanyak 7 indikator dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan 1 indikator lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Rata-rata pencapaian kinerja pada tahun 2016 adalah sebesar 91.45 % atau kategori baik. Sementara pada kinerja keuangan realisasi penyerapan anggaran APBD pada tahun 2016 adalah sebesar 93,50 persen atau Rp. 33.095.250.928,- dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 35.397.003.208,- dan realisasi anggaran dekonsentrasi (APBN) sebesar 59,52 persen atau sebesar Rp. 4.481.022.031,- dari jumlah anggaran sebesar Rp. 7.528.313.000,-.
2. Terdapat 2 (dua) indikator yang dirasa tidak tepat untuk menjadi indikator kinerja dinas yaitu Indikator jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan serta Indikator peningkatan omset pasar rakyat. Pada tahap revisi RPJMD 2016-2021 akan diusulkan untuk dilakukan revisi.
3. Dalam perencanaan strategis, indikator kinerja maupun target yang akan ditetapkan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Seperti perlunya penajaman indikator yang dinilai agar lebih relevan dan dapat diukur sesuai dengan data yang tersedia di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

4.2 PERMASALAHAN DAN KENDALA

Pencapaian kinerja sektor industri dan perdagangan menunjukkan trend perkembangan yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi

sektor perindustrian dan perdagangan sebagaimana tercermin pada beberapa indikator kinerja utama yang belum tercapai sesuai target, antara lain :

1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB yang masih mengalami penurunan.
2. Peningkatan nilai ekspor non migas.

Disamping permasalahan tersebut, sektor industri pengolahan Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi masalah klasik, seperti :

1. Daya saing produk IKM yang masih rendah (kualitas, desain, harga, kemasan, dan kontinuitas produksi).
2. Masih terbatasnya kemampuan pemasaran sebagian besar industri Sumatera Barat dan permodalan juga masih lemah.
3. Keakuratan data industri dari kabupaten/kota masih lemah.

Sedangkan persoalan yang terkait perdagangan antara lain seperti :

1. Ekspor masih terkonsentrasi pada beberapa komoditi tertentu, barang setengah jadi dan beberapa negara tujuan tertentu.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang belum memadai, seperti pasar tradisional yang perlu direhabilitasi, pusat kuliner dan lain-lain.
3. Terbatasnya kewenangan provinsi untuk membiayai sarana pasar.

4.3 REKOMENDASI

Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat lebih baik lagi. Hal-hal yang perlu diperbaiki adalah :

1. Menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang menghambat daya saing produk IKM, melalui pelatihan dan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi produk.
2. Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku dalam kuantitas, kualitas dan harga bersaing, yang nantinya dapat meningkatkan nilai tambah produk industri untuk dijadikan produk ekspor.
3. Melakukan pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan pelaksanaan monitoring perkembangan harga secara rutin setiap hari di pasar dalam rangka pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat guna menekan laju inflasi.
5. Memacu pertumbuhan sektor perdagangan dengan memperkuat Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.
6. Mengembangkan ekspor daerah dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait.

Demikianlah Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap sasaran pada tahun 2016 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.









PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan. Aur No. 1 Telp (0751) 28325, Kode Pos 25113 Padang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Asben Hendri, SE, MM.**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : **Irwan Prayitno**
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

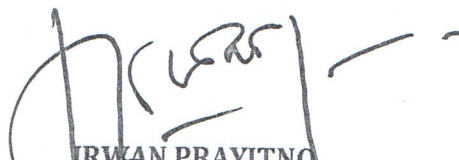
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Desember 2016

PIHAK KEDUA


IRWAN PRAYITNO

PIHAK PERTAMA



ASBEN HENDRI, SE, MM.

NIP. 19631209 198611 1 003

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TAHUN : 2016

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan.	1.1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	11,19
		1.2 Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi standarisasi produk industri (unit usaha)	85
		1.3 Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan (unit usaha)	652
		1.4 Kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas Sumatera Barat (%)	97,12
2.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dalam dan luar negeri.	2.1 Persentase kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	14,35
		2.2 Peningkatan omset pasar rakyat (%)	5,5
		2.3 Peningkatan Nilai Ekspor (%)	1,5
3.	Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga.	3.1 Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib, label, MKG, distribusi, jasa, sertifikat, registrasi) (%)	3,57

NO.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengembangan Perwilayahan	Rp. 886.502.000	APBD
2.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp. 3.174.462.500	APBD
3.	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri.	Rp. 3.593.934.650	APBD
4.	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Rp. 998.292.000	APBD
5.	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.	Rp. 1.169.249.860	APBD
6.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Rp. 373.710.200	APBD
	JUMLAH	Rp. 10.196.151.210	

Padang, Desember 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT


IRWAN PRAYITNO

KEPALA DINAS



Asben Hendri, SE, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631209 198611 1 003

RENCANA KERJA TAHUNAN

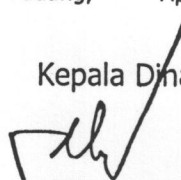
NAMA SKPD
TAHUN

: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
: 2016

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan	1. Persentase kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (%)	11,19
		2. Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk Industri (unit usaha)	85
		3. Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan (unit usaha)	652
		4. Kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas Sumatera Barat (%).	97,12
2.	Meningkatnya kinerja perdagangan dalam dan luar negeri.	1. Persentase kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	14,35
		2. Peningkatan omset pasar rakyat (%)	5,50
		3. Peningkatan nilai ekspor (%)	1,5
3.	Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga.	1. Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib, label, MKG, distribusi, jasa, sertifikat, registrasi) (%)	3,57

Padang, April 2016

Kepala Dinas,



Ir. H. Mudrika

Pembina Utama Madya

NIP. 19580209 198603 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
- Visi : Terwujudnya industri dan perdagangan yang tangguh dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
- Misi :
 - Mengembangkan industri unggulan daerah dalam rangka mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing dalam menghadapi MEA;
 - Mewujudkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing serta perlindungan konsumen.
- Tujuan :
 - Meningkatkan peranan sektor industri dalam perekonomian daerah;
 - Meningkatkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri serta perlindungan konsumen.
- Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan
- Fungsi :
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama						Program	Penanggung Jawa
		Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019		
1.	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan.	1. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Dalam PDRB.	% / tahun	11,19	11,42	11,65	11,87	12,10	12,33
		2. Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk industri	unit usaha / tahun	85	85	90	95	95	98
		3. Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan	unit usaha / tahun	652	672	675	675	675	675
		4. Kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas Sumatera Barat.	% / tahun	97,12	97,25	97,30	97,42	97,46	97,59
2.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dalam dan luar negeri.	1. Kontribusi sub sektor perdagangan dalam PDRB.	% / tahun	14,35	15,90	16,29	17,85	18,24	18,35
		2. Persentase omset pasar rakyat	% / tahun	5,5	6,0	6,3	6,3	6,3	6,3
		3. Peningkatan nilai ekspor.	% / tahun	1,5	2	2	3	3	3
3.	Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga.	1. Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai ketentuan (SNI Wajib, label, MKG, distribusi, jasa)	% / tahun	3,57	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33

Padang, September 2016
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sumatera Barat

Asben Hendri SE, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19631209 198611 1 003

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2016	Rencana Aksi	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Kendala	Tindak Lanjut	Program dan Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan	1.1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	11,19%	- Melakukan pelatihan pada IKM yang ada di sentra. Pelatihan mencakup :							Program Pengembangan Perwilayahan.	
				a. Peningkatan produksi		1 sentra	2 sentra	1 sentra			Kegiatan :	
				b. Pengembangan desain		2 sentra	2 sentra				1. Pengembangan Tenun Sumatera Barat	Bidang Industri Non Agro
				- Melaksanakan forum diskusi pengembangan sentra dengan kab/kota.		1 kali		1 kali			2. Pengembangan Produk Bordir/Sulaman Sumatera Barat.	Bidang Industri Non Agro
											3. Pengembangan Desain Produk dari Kulit.	Bidang Industri Non Agro
											4. Koordinasi Pengembangan Minyak Atsiri	Bidang Industri Agro
											Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.	
											Kegiatan :	
		1.2 Persentase kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas Sumatera	97,12%	- Melakukan pelatihan peningkatan nilai tambah produk IKM yang potensial ekspor.		2 produk	3 produk	1 produk			1. Pembinaan Industri Kecil Menengah Berbasis Hasil Laut dan Perikanan.	Bidang Industri Agro
											2. Pengembangan Industri Minuman	Bidang Industri Agro
											3. Pembinaan dan Pengembangan Produk Kerajinan Sumbar	UPRD Promosi
											4. Pelatihan Teknis dan Pengembangan Disain Kerajinan Kayu dan Bambu.	Bidang Industri Agro.
											5. Pengembangan Industri Kerajinan Batu Permata (Batu Akik)	Bidang Industri Non Agro
											6. Pelatihan Teknis dan Diversifikasi Produk Minyak Atsiri.	Bidang Industri Agro
		1.3 Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi standarisasi produk industri (unit usaha)	85 IKM	- Menyusun data IKM yang telah layak untuk difasilitasi sertifikasi dan standarisasi.		19 kab/kota					7. Sosialisasi Kemasan, Sertifikasi Halal, MD dan SNI bagi IKM	Bidang Industri Agro
				- Melakukan sosialisasi tentang sertifikasi dan standarisasi bagi IKM		1 kali					8. Penyebarluasan Informasi HKI dan Bantuan Pendaftaran Merk.	Bidang Industri Non Agro

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2016	Rencana Aksi	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Kendala	Tindak Lanjut	Program dan Kegiatan	Penanggung Jawab
				- Melakukan fasilitasi sertifikasi dan standarisasi bagi produk IKM.		10 sertifikat halal, 25 MD	50 HKI (merk)				9. Pelatihan Teknik Pengelasan Alsintan	UPTD Balai Perekayasaan
		1.4 Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan (unit usaha)	652 unit usaha	- Melakukan pelatihan dan pembinaan bagi IKM		4 kali pelatihan	5 kali pelatihan	1 kali pelatihan			10. Pembinaan Kelompok Industri Berbasis Coklat	Bidang Industri Agro
											11. Pembinaan Pengelolaan Limbah Cair kepada Pelaku IKM	Bidang Industri Non Agro
											12. Pelatihan Ketrampilan Industri Perkapalan Rakyat.	Bidang Industri Non Agro
											13. Pelatihan Pembuatan Alsintan	UPTD Balai Perekayasaan
											14. Pembuatan Prototipe Teknologi Tepat Guna Alsintan	UPTD Balai Perekayasaan
											15. Pelatihan Penggunaan Teknologi Tepat Guna bagi IKM	UPTD Balai Perekayasaan
											16. Pelatihan Wirausaha Baru di Bidang Industri	Bidang Industri Agro.
											17. Sosialisasi Penerbitan dan Pemanfaatan Izin Usaha Industri	Bidang Industri Agro.
											18. Pelatihan Produksi Barang dari Bahan Baku Karet (Compound)	Bidang Industri Non Agro
2.	Meningkatnya kinerja perdagangan dalam dan luar negeri.	2.1 Persentase kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	14,35 %	- Melakukan temu usaha atau forum dagang dengan provinsi lain.		1 kali					Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.	
				- Melakukan promosi terhadap produk IKM Sumbang melalui ajang pameran dan media website.		4 kali pameran	7 kali pameran	3 kali pameran			Kegiatan :	
											1. Penyusunan Data Pasar Tradisional di Sumatera Barat.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
		2.2 Peningkatan omzet pasar rakyat (%)	5,5 %	- Melakukan pendataan terhadap sarana pasar rakyat yang ada di kab/kota.			1 kali				2. Monev Distribusi Pupuk Bersubsidi	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
				- Melaksanakan pasar lelang komoditi agro Sumbang.		2 kali	3 kali	3 kali			3. Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk IKM Sumbang.	UPTD Balai Promosi dan Pemasaran
											4. Temu Usaha Pengembangan Pasar bagi Industri Kecil.	UPTD Balai Promosi dan Pemasaran
											5. Bimbingan Teknis dan Pengawasan Teknis kepada Aparat tentang SIUP dan TDP Kab/Kota Sumatera Barat.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri

[illegible]

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2016	Rencana Aksi	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Kendala	Tindak Lanjut	Program dan Kegiatan	Penanggung Jawab
3.		3.1 Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib, label, MKG, distribusi, jasa, sertifikat, registrasi) (%)	3,57 %	- Melakukan pengawasan terhadap barang beredar di 17 kab/kota Sumatera Barat.	2 kali pengawasan (untuk mainan anak dan AMDK)	3 kali pengawasan (untuk garam beryodium dan korek api gas)	2 kali pengawasan (untuk MKG dan barang yang diatur tata niaganya)				Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	
				- Melakukan uji laboratorium terhadap barang yang diawasi.			6 merk, 314 sampel				Kegiatan :	
				- Melaporkan hasil pengawasan ke Kementerian Perdagangan RI.				4 laporan			1. Pelaksanaan Pengawasan Kemetrolagian	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk
				- Memberikan teguran kepada pelaku usaha yang menjual barang yang tidak sesuai ketentuan.							2. Pengawasan Barang Beredar di Pasaran (SNI Wajib, Label, dan Barang yang diatur tata niaganya).	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk
											3. Sosialisasi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk
											4. Pelaksanaan Tertib Ukur Melalui Tera / Tera Ulang Alat UTTP di Kab/Kota Sumatera Barat.	UPTD Balai Metrologi
											5. Persiapan Pasar Tertib Ukur di Pasar dan Daerah Tertib Ukur di 2 (dua) Pasar di Sumatera Barat	UPTD Balai Metrologi
											6. Pelaksanaan Verifikasi Alat Standar Laboratorium kemetrolagian	UPTD Balai Metrologi
											7. Pengawasan Mutu Produk Industri	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk

Padang, Januari 2016

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sumatera Barat

Ir. H. Mudrika
NIP. 19580209 198603 1 004

**REALISASI DAN CAPAIAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2016	Rencana Aksi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kendala	Tindak Lanjut	Program dan Kegiatan	Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1.	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan	1.1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	11,19%	- Melakukan pelatihan pada IKM yang ada di sentra. Pelatihan mencakup : a. Peningkatan produksi			1 sentra	1 sentra	2 sentra	2 sentra	1 sentra	1 sentra	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan di sentra, tapi setelah dilakukan evaluasi, kedepannya akan dilakukan kegiatan yang lebih optimal untuk meningkatkan nilai produksi dalam rangka memberikan kontribusi dalam struktur PDRB Sumatera Barat.	Menyusun kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian peningkatan nilai produksi IKM.	Program Pengembangan Perwilayahan.	
				b. Pengembangan desain			2 sentra	2 sentra	2 sentra	2 sentra			Tidak ada kendala		1. Pengembangan Tenun Sumatera Barat	Bidang Industri Non Agro
				- Melaksanakan forum diskusi pengembangan sentra dengan kab/kota.			1 kali	1 kali			1 kali	1 kali	Tidak ada kendala		2. Pengembangan Produk Bordir/Sulaman Sumatera Barat.	Bidang Industri Non Agro
															3. Pengembangan Desain Produk dari Kulit.	Bidang Industri Non Agro
															4. Koordinasi Pengembangan Minyak Atsiri	Bidang Industri Agro
															Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.	
															Kegiatan :	
		1.2 Persentase kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas Sumatera	97,12%	- Melakukan pelatihan peningkatan nilai tambah produk IKM yang potensial ekspor.			2 produk	2 produk	3 produk	3 produk	1 produk	1 produk	Tidak ada kendala		1. Pembinaan Industri Kecil Menengah Berbasis Hasil Laut dan Perikanan.	Bidang Industri Agro
															2. Pengembangan Industri Minuman	Bidang Industri Agro
															3. Pembinaan dan Pengembangan Produk Kerajinan Sumbar	UPRD Promosi
															4. Pelatihan Teknis dan Pengembangan Disain Kerajinan Kayu dan Bambu.	Bidang Industri Agro.
															5. Pengembangan Industri Kerajinan Batu Permata (Batu Akik)	Bidang Industri Non Agro

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2016	Rencana Aksi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kendala	Tindak Lanjut	Program dan Kegiatan	Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
															6. Pelatihan Teknis dan Diversifikasi Produk Minyak Atsiri.	Bidang Industri Agro
		1.3 Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi standarisasi produk industri (unit usaha)	85 IKM	- Menyusun data IKM yang telah layak untuk difasilitasi sertifikasi dan standarisasi.			19 kab/kota	19 kab/kota					Tidak ada kendala		7. Sosialisasi Kemasan, Sertifikasi Halal, MD dan SNI bagi IKM	Bidang Industri Agro
				- Melakukan sosialisasi tentang sertifikasi dan standarisasi bagi IKM			1 kali	1 kali					Tidak ada kendala		8. Penyebarluasan Informasi HKI dan Bantuan Pendaftaran Merk.	Bidang Industri Non Agro
				- Melakukan fasilitasi sertifikasi dan standarisasi bagi produk IKM.			10 sertifikat halal, 25 MD	10 sertifikat halal, 25 MD	50 HKI (merk)	50 HKI (merk)			Fisik pelaksanaan kegiatan tidak ada kendala, hanya ada masukan dari IKM tentang tingginya biaya pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat mutu produk.	Direncanakan untuk melakukan koordinasi dan kerjasama lebih lanjut dengan pihak-pihak lain yang dapat memberikan fasilitasi sertifikasi dan standarisasi kepada IKM.	9. Pelatihan Teknik Pengelasan Alsintan	UPTD Balai Perekayasaan
		1.4 Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan (unit usaha)	652 unit usaha	- Melakukan pelatihan dan pembinaan bagi IKM			4 kali pelatihan	4 kali pelatihan	5 kali pelatihan	5 kali pelatihan	1 kali pelatihan	1 kali pelatihan	Tidak ada kendala		10. Pembinaan Kelompok Industri Berbasis Coklat	Bidang Industri Agro
															11. Pembinaan Pengelolaan Limbah Cair kepada Pelaku IKM	Bidang Industri Non Agro
															12. Pelatihan Ketrampilan Industri Perkapalan Rakyat.	Bidang Industri Non Agro
															13. Pelatihan Pembuatan Alsintan	UPTD Balai Perekayasaan
															14. Pembuatan Prototipe Teknologi Tepat Guna Alsintan	UPTD Balai Perekayasaan
															15. Pelatihan Penggunaan Teknologi Tepat Guna bagi IKM	UPTD Balai Perekayasaan
															16. Pelatihan Wirausaha Baru di Bidang Industri	Bidang Industri Agro.
															17. Sosialisasi Penerbitan dan Pemanfaatan Izin Usaha Industri	Bidang Industri Agro.
															18. Pelatihan Produksi Barang dari Bahan Baku Karet (Compound)	Bidang Industri Non Agro
2.	Meningkatnya kinerja perdagangan dalam dan luar negeri.	2.1 Persentase kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	14,35 %	- Melakukan temu usaha atau forum dagang dengan provinsi lain.			1 kali	1 kali					Tidak ada kendala		Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.	
				- Melakukan promosi terhadap produk IKM Sumbar melalui ajang pameran dan media website.			4 kali pameran	4 kali pameran	7 kali pameran	7 kali pameran	3 kali pameran	2 kali pameran	Tidak terlaksananya 1 kali pameran akibat adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.		Kegiatan :	
															1. Penyusunan Data Pasar Tradisional di Sumatera Barat.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
		2.2 Peningkatan omzet pasar rakyat (%)	5,5 %	- Melakukan pendataan terhadap sarana pasar rakyat yang ada di kab/kota.					1 kali	1 kali			Tidak ada kendala		2. Monev Distribusi Pupuk Bersubsidi	Bidang Perdagangan Dalam Negeri

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2016	Rencana Aksi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kendala	Tindak Lanjut	Program dan Kegiatan	Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
				- Melaksanakan pasar lelang komoditi agro Sumbang.			2 kali	2 kali	3 kali	3 kali	3 kali	2 kali	Tidak terlaksananya 1 kali lelang ke Jambi akibat adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.		3. Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk IKM Sumbang.	UPTD Balai Promosi dan Pemasaran
															4. Temu Usaha Pengembangan Pasar bagi Industri Kecil.	UPTD Balai Promosi dan Pemasaran
															5. Bimbingan Teknis dan Pengawasan Teknis kepada Aparat tentang SIUP dan TDP Kab/Kota Sumatera Barat.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
															6. Peningkatan Promosi IKM di Sumatera Barat	UPTD Balai Promosi dan Pemasaran
															7. Peningkatan Promosi IKM di Luar Sumatera Barat	UPTD Balai Promosi dan Pemasaran
															8. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
															9. Penyelenggaraan Pasar Murah	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
															10. Pengembangan Pasar Komoditi Lokal melalui Pasar Lelang Luar Provinsi.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
															11. Pelaksanaan Pasar Lelang Forward di Sumatera Barat	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
															12. Pelaksanaan Icon Inacraft ke 18.	UPTD Balai Promosi dan Pemasaran
		2.3 Peningkatan nilai ekspor (%)	1,5 %	- Melakukan pelatihan dan sosialisasi bagi eksportir dan aparatur perdagangan.			3 kali	3 kali	4 kali	4 kali	3 kali	3 kali	Tidak ada kendala		Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri.	
				- Melakukan pengujian dan pengawasan terhadap mutu barang ekspor			3 komoditi	3 komoditi	3 komoditi	3 komoditi	1 komoditi	1 komoditi	Tidak ada kendala		Kegiatan :	
															1. Pelatihan Prosedur Ekspor dan Impor Bagi Aparat Perdagangan dan UKM	Bidang Perdagangan Luar Negeri
															2. Temu Usaha dan Sosialisasi Pengembangan Produk Komoditi Ekspor.	Bidang Perdagangan Luar Negeri
															3. Sosialisasi Mutu Komoditi Ekspor	Bidang Perdagangan Luar Negeri
															4. Identifikasi Produk Impor di Sumbang	Bidang Perdagangan Luar Negeri
															5. Pengujian Mutu Barang Ekspor	UPTD BPMB
															6. Re-Akreditasi Laboratorium	UPTD BPMB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2016	Rencana Aksi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kendala	Tindak Lanjut	Program dan Kegiatan	Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
															7. Pengawasan Mutu Komoditi	UPTD BPMB
															8. Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Komoditi Ekspor	UPTD BPMB
3.		3.1 Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib, label, MKG, distribusi, jasa, sertifikat, registrasi) (%)	3,57 %	- Melakukan pengawasan terhadap barang beredar di 17 kab/kota Sumatera Barat.	2 kali pengawas an (untuk mainan anak dan AMDK)	2 kali pengawas an (untuk mainan anak dan AMDK)	3 kali pengawas an (untuk garam beryodium dan korek api gas)	3 kali pengawas an (untuk garam beryodium dan korek api gas)	2 kali pengawas an (untuk MKG dan barang yang diatur tata niaganya)	2 kali pengawas an (untuk MKG dan barang yang diatur tata niaganya)			Tidak ada kendala		Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	
				- Melakukan uji laboratorium terhadap barang yang diawasi.					6 merk, 314 sampel	6 merk, 314 sampel			Tidak ada kendala		Kegiatan :	
				- Melaporkan hasil pengawasan ke Kementerian Perdagangan RI.							4 laporan	4 laporan	Tidak ada kendala		1. Pelaksanaan Pengawasan Kemetrolagian	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk
				- Memberikan teguran kepada pelaku usaha yang menjual barang yang tidak sesuai ketentuan.											2. Pengawasan Barang Beredar di Pasaran (SNI Wajib, Label, dan Barang yang diatur tata niaganya).	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk
															3. Sosialisasi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk
															4. Pelaksanaan Tertib Ukur Melalui Tera / Tera Ulang Alat UTTP di Kab/Kota Sumatera Barat.	UPTD Balai Metrologi
															5. Persiapan Pasar Tertib Ukur di Pasar dan Daerah Tertib Ukur di 2 (dua) Pasar di Sumatera Barat	UPTD Balai Metrologi
															6. Pelaksanaan Verifikasi Alat Standar Laboratorium kemetrolagian	UPTD Balai Metrologi
															7. Pengawasan Mutu Produk Industri	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk

Padang, Januari 2017

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sumatera Barat

Asben Hendri, SE, MM.

NIP. 19631209 198611 1 003